

**PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PENDUKUNG
DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN AKHLAK
DI SMKN 1 PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

HIMMATUL 'ALIYYAH

NIM. 201200086

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

‘Aliyyah, Himmatul. 2024. Peran Komite Sekolah dalam Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing H. Mukhlison Effendi, S.Ag. M.Ag.

Kata kunci: Peran, Komite Sekolah, Pendidikan Akhlak

Komite sekolah sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga sekolah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan tempatnya yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Namun, dalam implementasinya peran komite sendiri masih belum maksimal sebagai pendukung proses pendidikan sekolah agar pihak penyedia pendidikan atau sekolah dapat terjembatani kepada konsumen pendidikan yaitu masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 1) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo. 2) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo. 3) faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menemukan fenomena yang ada dalam lingkungan sosial dengan mengedepankan pada interaksi antara peneliti dengan sumber penelitian. Fenomenologi merupakan kajian penelitian kualitatif dengan melihat fenomena alami yang ada didepan mata serta mengamatinya dalam keadaan sadar dan mengaitkannya dengan pengalaman yang ada.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Komite sekolah SMKN 1 Ponorogo berperan penting sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak. Dukungan ini terlihat melalui keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan lingkungan, serta pengalokasian anggaran untuk program-program pendidikan akhlak. 2) Sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah turut berperan aktif dalam memberikan usulan, kritik, dan saran untuk program pendidikan akhlak. Mereka berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat, memberikan masukan terkait rencana kegiatan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. 3) Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan akhlak mencakup keterbukaan pihak sekolah dan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter. Namun, terdapat juga faktor penghambat, seperti keterbatasan kemampuan komite dalam pengawasan dan keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program. Selain itu, respon pribadi siswa terhadap pembiasaan karakter positif dan kegiatan keagamaan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

ABSTRACT

'Aliyyah, Himmatul. 2024. The Role of the School Committee in Building Moral Education at SMKN 1 Ponorogo. **Thesis.** Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Ponorogo State Islamic Institute. Supervisor H. Mukhlison Effendi, S.Ag. M.Ag.

Key words: Role, School Committee, Moral Education

A school committee is really needed in a school institution to support the continuity of education in the midst of community life and its location in the middle of community settlements. However, in its implementation the role of the committee itself is still not optimal as a supporter of the school education process so that education providers or schools can be bridged to education consumers, namely the community.

This research aims to analyze and describe 1) the role of the school committee as a supporter in building moral education at SMKN 1 Ponorogo. 2) the role of the school committee as a consideration in developing moral education at SMKN 1 Ponorogo. 3) supporting and inhibiting factors for the role of the school committee in developing moral education at SMKN 1 Ponorogo.

The type of research used in this research is qualitative descriptive research with a phenomenological approach. Qualitative research is research that aims to discover phenomena that exist in the social environment by prioritizing interactions between researchers and research sources. Phenomenology is a qualitative research study by looking at natural phenomena that are in front of the eyes and observing them in a conscious state and relating them to existing experiences.

The results of this research are 1) The school committee of SMKN 1 Ponorogo plays an important role as a supporter in building moral education. This support can be seen through openness in implementing educational activities, collaboration with parents, the community and the environment, as well as budget allocation for moral education programs. 2) As a consideration provider, the school committee plays an active role in providing suggestions, criticism and suggestions for moral education programs. They participate in hearings, provide input regarding activity plans, and supervise budget use. 3) Supporting factors in implementing moral education programs include openness from the school and full support for religious activities and character formation. However, there are also inhibiting factors, such as the committee's limited ability to supervise and budget limitations which can affect the sustainability of the program. Apart from that, students' personal responses to positive character development and religious activities are also challenges in implementing the program.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Himmatul 'Aliyyah
NIM : 201200086
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam
Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 20 September 2024

Pembimbing

H. Mukhlison Effendi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197104302000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Muhammad Wathoni, M.Pd. I.
NIP. 197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Himmatul 'Aliyyah
NIM : 201200086
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam
Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Oktober 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Oktober 2024

Ponorogo, 21 Oktober 2024

Mengesahkan




Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Mok. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Wirawan Fadly, M.Pd
Penguji 1 : Syaiful Arif, M.Pd
Penguji 2 : H. Mukhlison Efendi, S.Ag. M. Ag

()
()
()

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himmatul 'Aliyyah

NIM : 201200086

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul Skripsi : Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung Dalam Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2024

Pembuat Pernyataan



Himmatul 'Aliyyah
201200086



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himmatul 'Aliyyah
NIM : 201200086
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam
Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 September 2024
Yang membuat pernyataan



Himmatul 'Aliyyah
NIM. 201200086

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digitalisasi seperti sekarang moralitas masih menjadi problematika yang begitu memprihatinkan di lingkungan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berbanding terbalik dengan semakin menurunnya akhlak dari sumber daya manusia yang ada. Dekadensi moral yang terjadi akhir-akhir ini paling banyak didominasi oleh para pelajar sehingga perlu perhatian dan tindakan khusus guna meminimalisir masalah yang ada. Contoh berita yang dikutip dari tulisan Risa dalam kanal Kalimantan, “*Sepanjang Enam Bulan Terakhir Kota Banjarbaru dihebohkan dengan Kasus Pembuangan Bayi*”. Ada 4 kasus bayi dibuang periode November 2022 hingga April 2023, tiga kasus bayi yang ditelantarkan hingga kini tak ditemukan siapa orangtua pemilik anak. Maraknya kasus pembuangan bayi di ibu kota Provinsi Kalsel dalam enam bulan terakhir dinilai sebagai kemerosotan akhlak dan pergeseran norma, serta nilai di lingkungan masyarakat.”¹

Berdasarkan fakta yang ada masalah ini seperti tidak ada penyelesaiannya karena setiap tahun masalahnya masih sama bahkan seperti bertambah semakin buruk. Banyak faktor yang mempengaruhi kemerosotan moral atau akhlak hingga maraknya hamil diluar nikah di berbagai tempat.

¹ (Online), Risa “Marak Kasus Bayi Dibuang di Banjarbaru: Kemerosotan Moral, Seks Bebas hingga Kontrol Sosial, <https://www.kanalkalimantan.com/marak-kasus-bayi-dibuang-di-banjarbaru-kemerosotan-moral-seks-bebas-hingga-kontrol-sosial/> dikutip pada 29 Oktober 2023 pukul 14.28 WIB.

Dikutip dari tulisan Mohammad Iskarim dalam “*Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)*” bahwa banyak faktor yang memicu dekadensi moral. Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama; kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat; ketiga, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis.² Dari beberapa faktor yang ada rumah tangga (keluarga), sekolah, dan masyarakat memiliki peran untuk membina akhlak dari para remaja sekolah itu sendiri.

Menurut Singgih Aji dalam tulisannya, “*Orientasi Baru Lingkungan Pendidikan*”, bahwa para pakar pendidikan dalam beberapa literatur pendidikan mengklasifikasikan lingkungan pendidikan menjadi tiga jenis kategori, yaitu lingkungan keluarga yang merupakan unit pertama institusi dalam masyarakat. berkembangnya karakter anak (individu) dan terbentuk tahap-tahap awal permasyarakatan (*socialization*) dimulai dari tahap ini. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah, yang berperan sebagai kelanjutan dari lingkungan rumah tangga. Di sekolah seorang anak mendapatkan berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya. Terakhir adalah lingkungan masyarakat yaitu kesatuan hidup mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.³

² Mochamad Iskarim, “Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa), *Jurnal Edukasia Islamika* : Volume 1, Nomor 1, Desember 2016”. 4-6.

³ Singgih Aji Purnomo, “Orientasi Baru Lingkungan Pendidikan,” *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Volume 03 (02), 2021.

Perlu kita cermati bahwa modal utama atau hal yang pertama dibentuk adalah akhlak atau karakter, sehingga pembentukan karakter yang sudah dimulai sejak di lingkungan keluarga harus dilanjutkan oleh lingkungan sekolah dan masyarakat. Di era pendidikan sekarang kita mengenal istilah komite sekolah yaitu anggota masyarakat yang berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam sekolah. Komite sekolah adalah organisasi tersendiri yang berperan adalah masyarakat guna untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui sekolah tersebut. Komite sekolah adalah yang mewadahi dukungan masyarakat sekitar untuk membantu sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Komite sekolah sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga sekolah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan tempatnya yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat.⁴ Namun, dalam implementasinya peran komite sendiri masih belum maksimal sebagai pendukung proses pendidikan sekolah agar pihak penyedia pendidikan atau sekolah dapat terjembatani kepada konsumen pendidikan yaitu masyarakat. Tujuan dari dibentuknya komite sekolah atau sekolah adalah, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menciptakan kebijakan operasional dan program pendidikan. Selain itu tujuannya adalah membuat masyarakat sadar akan tanggung jawab dan perannya dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, dan terakhir adalah mewujudkan

⁴ Baharuddin, *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 292.

kondisi yang demokratis, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan maupun pelayanan pendidikan yang bermutu.⁵

Komite sekolah atau sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan wali murid, masyarakat secara luas, dan komunitas sekolah yang peduli dengan pendidikan. Komite sekolah atau sekolah berperan dalam membangun pelayanan pendidikan, serta dukungan maupun arahan bagi seluruh komponen yang ada di tingkat satuan pendidikan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Lilys Febriana pada tahun 2019 dengan judul “Peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang”,⁶ hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangatlah baik, bisa dilihat dari peningkatan sarana prasarana yang ada di sekolah. Dengan begittu peran komite cukup mampu menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan perwakilan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat terealisasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat menjadi jembatan untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat kepada sekolah, selain itu dengan adanya komite sekolah permasalahan utama dekadensi moral yang terjadi

⁵ Abdul Mukti Bisri, “Studi Analisis Komite Sekolah/Sekolah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan,” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (March 25, 2020): 51–64, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>.

⁶ Lilys Febriana, “Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang,” *Jurnal PAI Raden Fatah*, vol. 1, no .2, (2019).

dimasyarakat yang khususnya banyak dari para remaja atau pelajar dapat ditekan ke angka yang lebih rendah secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016,⁷ tugas komite sekolah antara lain:

1. Memberikan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan program pendidikan, termasuk program pengembangan karakter dan akhlak.
2. Menggalang dana dan sumber daya untuk mendukung kegiatan pendidikan yang tidak terbiayai oleh dana dari pemerintah, seperti kegiatan religius, pesantren kilat, dan pengajian rutin.
3. Memonitor dan mengevaluasi layanan pendidikan agar berjalan efektif, termasuk mengevaluasi keberhasilan program pendidikan akhlak.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan karakter melalui kegiatan bersama sekolah, seperti program tahfidz dan kegiatan sosial keagamaan.

Di SMKN 1 Ponorogo, komite sekolah memberikan dukungan nyata dalam pendidikan akhlak melalui program mengaji Umami yang ditujukan khusus bagi siswa kelas 10. Program ini tidak hanya muncul sebagai inisiatif ide dari komite, tetapi juga mendapat dukungan penuh dalam hal pembiayaan. Tujuannya adalah untuk membekali siswa baru dengan dasar-dasar bacaan Al-Qur'an yang benar, sekaligus menanamkan nilai-nilai religius sejak awal mereka memasuki lingkungan sekolah. Melihat

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016

efektivitasnya, program ini kemudian berkembang menjadi pemrograman tahfidz. Fokus tahfidz adalah mendorong siswa untuk menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, sehingga aspek akhlak dan spiritualitas mereka semakin terasah. Selain itu, program tahfidz juga bertujuan membangun kebiasaan beribadah yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baik guru maupun siswa memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan program ini. Guru merasa terbantu dalam proses pembinaan karakter, sementara siswa merasakan peningkatan motivasi dalam mempelajari dan mencintai Al-Qur'an. Program ini terbukti berperan signifikan dalam membentuk perilaku religius dan disiplin siswa, sekaligus menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat akhlak mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan fakta yang memperkuat inti permasalahan, peneliti akan membahas tentang peran komite sekolah dalam suatu lembaga pendidikan dalam membangun pendidikan akhlak. Peneliti mengangkat sebuah judul “Peran Komite Sekolah dalam Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo”. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi tentang peran komite dalam lembaga pendidikan dan menjadi sebuah rujukan bagi penelitian selanjutnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam Penelitian ini adalah :

1. Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak.
2. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo
3. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo?
2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak Di SMKN 1 Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya peran komite sebagai pendukung sekolah dalam membangun pendidikan akhlak yang ada di sekolah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran yang mengutamakan pada peranan komite dalam membangun pendidikan akhlak siswa. Sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ditingkat SMKN.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan memberikan solusi pada saat pembelajaran mengenai cara menyikapi akhlak siswa yang kurang baik.
- c. Bagi peserta didik, diharapkan dapat menerima dengan baik kegiatan/materi yang bersangkutan dengan pendidikan akhlak,

sehingga peserta didik dapat lebih baik dalam menerapkan materi pendidikan akhlak di lingkungan sekitar.

- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama di bidang peran komite di sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang yang meliputi beberapa sub antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penelitian dan yang terakhir jadwal penelitian.

BAB II : TEORI

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka berupa landasan teori, telaah penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : PEMAPARAN PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, tahapan penelitian.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang mana berisikan analisis hasil dari semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran Komite

a. Pengertian Komite Sekolah

Menurut Sudirman dikutip dari tulisan Abdul Mukti Bisri komite sekolah/sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan wali murid, masyarakat secara luas, dan komunitas sekolah yang peduli dengan pendidikan. Komite sekolah/sekolah berperan dalam membangun pelayanan pendidikan, serta dukungan maupun arahan bagi seluruh komponen yang ada di tingkat satuan pendidikan. Terlebih dapat membantu dalam hal pengawasan selama satuan pendidikan tersebut aktif. Menurut Faqih dikutip dari tulisan Abdul Mukti dalam kebijakan otonomi pendidikan, peranan masyarakat lebih dimaksimalkan karena tidak hanya menjadi donatur semata tapi juga perlu dilibatkan dalam upaya pengembangan pendidikan.¹

Secara lebih jelas legalitas komite sekolah/sekolah di lembaga pendidikan dinaungi dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/sekolah yang menjelaskan bahwa komite sekolah/sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-

¹ Abdul Mukti Bisri, "Studi Analisis Komite Sekolah/Sekolah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (March 25, 2020): 51–64, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>.

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah/Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati. Sedangkan badan seperti BP3, Komite Sekolah/Sekolah dan/atau Majelis Sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.²

Komite sekolah sendiri adalah organisasi tersendiri yang berperan adalah masyarakat guna untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui sekolah tersebut. Komite sekolah adalah yang mewadahi dukungan masyarakat sekitar untuk membantu sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Komite sekolah sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga sekolah guna untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan tempatnya yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Komite sekolah dibentuk oleh *stakeholder*. Nama generik disesuaikan dengan masing-masing sekolah itu sendiri, sekolah ada komite dapat memperluas fungsi, keanggotaan dan peran sesuai dengan acuan-acuan.³

Pendapat lain dikemukakan oleh Susanto dalam tulisan Ariyadi menyatakan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,

² Failasuf Fadli, *Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2014), 61-62.

³ Baharuddin, *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 292.

pemertaaan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Didukung oleh Mulyasa juga dalam tulisan Ariyadi bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah dan setiap sekolah bisa mempunyai satu komite sekolah atau bergabung dengan sekolah lain mendirikan satu komite sekolah.⁴

Menurut keputusan Mendiknas, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Komite sekolah berkedudukan di sekolah, dan setiap sekolah bisa mempunyai satu komite sekolah atau bergabung dengan sekolah lain untuk mendirikan satu komite sekolah. Komite sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak sekali komite sekolah yang tidak mampu mandiri terutama dalam pencairan dana sehingga hanya mengandalkan dana dari pemerintah.⁵ Sedangkan Menurut Syaiful Sagala komite sekolah merupakan organisasi Masyarakat

⁴ Ariyadi Raberi, dkk, "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru," *Jurnal Al-Qiyam* 1, no. 1 (June 29, 2020): 11–20, <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i1.123>.

⁵ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 127.

pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.⁶

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah.⁷

Dari semua penjelasan terkait komite sekolah/sekolah di atas, dapat kita simpulkan garis besarnya bahwa pengertian komite sekolah/sekolah adalah lembaga independen dari unsur masyarakat, sekolah, dunia usaha, wali/orang tua peserta didik yang menjadi wadah aspirasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam segala tingkatan dan jalur pendidikan.

b. Tujuan Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dimaksudkan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen, dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044 Tahun 2002, Permendikbud nomor 75

⁶ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 251.

⁷ Khaeruddin dan Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Sekolah* (Jogjakarta: Nuansa Aksara 2007), 248.

tahun 2016). Komite sekolah dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, nilai, dan kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah diharapkan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), pembagian kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai organisasi masyarakat sekolah, komite sekolah dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 4) Membantu sekolah/sekolah dalam menyelenggarakan mutu pendidikan.⁸

c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Namun sampai saat ini lebih banyak bersifat

⁸ Suhadi Winoto, *Komite Sekolah/Sekolah dan Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Bildung, 2021), 6-7.

slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab stakeholder masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Disebutkan didalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia, pada Pasal 56 Ayat (3), bahwa: “Komite Sekolah/Madrasah, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.⁹

Adapun peran komite sekolah dalam kaitannya untuk memajukan pendidikan yaitu sebagai berikut.¹⁰

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*). Komite sekolah memiliki peran untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*). Dalam hal ini, komite sekolah dapat berperan sebagai pendukung, baik yang secara finansial, pemikiran maupun tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*). Komite sekolah juga memiliki peran mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Depdiknas, 2003, hlm. 49

¹⁰ M. Misbah, “Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 14, no. 1 (2009): 4.

- 4) Mediator. Komite sekolah menjadi perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi dari komite sekolah dalam kaitannya untuk memajukan pendidikan yaitu sebagai berikut.¹¹

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai hal-hal terkait pendidikan
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

¹¹ Misbah, 4-5.

2. Sekolah

a. Pengertian Sekolah

Secara etimologi dalam kosa kata Bahasa Arab, istilah sekolah berasal dari akar kata “*al-madrasah*” yang berarti tempat peserta didik untuk menimba ilmu.¹² Sedangkan dalam kosa kata Bahasa Indonesia, istilah sekolah berarti rumah tempat murid belajar.¹³ Adapun menurut para tokoh ahli definisi sekolah yaitu:¹⁴

- 1) Abdullah menyatakan bahwa sekolah menurut Abdullah berasal dari bahasa Latin, yaitu *skhhole*, *scola*, *secolae* atau *skhola* yang dapat diartikan sebagai waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, membaca huruf hingga mengenal tentang moral atau budi pekerti dan estetika atau seni.
- 2) Yusran Pora menyatakan bahwa sekolah adalah tidak hanya sekedar tempat untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi hal terpenting adalah, sekolah menjadi tempat bagi para guru dan siswa untuk belajar bersama, mengamati sesuatu yang ada di sekeliling bersama-sama, dan

¹² A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 772.

¹³ Ananda Santoso dan Slamet Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2010), 311.

¹⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 31.

sekolah juga menjadi tempat untuk para siswa membentuk jati dirinya. Sekolah juga dapat membentuk karakter peserta didik agar paham bagaimana cara bersikap terhadap sesama manusia maupun dengan lingkungan.

- 3) Menurut Ferry Effendy menyatakan bahwa sekolah dapat didefinisikan sebagai untuk bermain, bersosialisasi, berkreasi, dan tentunya untuk belajar dan mengasah otak. Sekolah tidak hanya tentang belajar, akan tetapi sekolah juga bertujuan untuk membina dan membimbing para siswanya. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada siswa mengenai kesehatan dan kebugaran.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sekolah yaitu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secara meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

b. Macam-macam Sekolah

Dalam proses penyelenggaraannya suatu sekolah tentu disesuaikan dengan jenis pendidikan yang diimplementasikan. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat menempuh pendidikan

sesuai dengan aspek kebutuhan, tingkatan usia, hingga tujuan akhir pemilihan sekolah. Adapun secara lebih rinci mengenai macam-macam sekolah tersebut, yaitu sebagai berikut.¹⁵

1) Ditinjau dari segi yang mengusahakan:

a) Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas, keuangan maupun pengadaan tenaga pengajar. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah ini ditetapkan di dalam pasal 31 UUD 1945, yang pengaturan penyelenggaraannya diatur menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Instansi penyelenggara pada umumnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan Departemen Agama untuk sekolah yang berciri khas agama Islam.

b) Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan-badan swasta. Hal ini sebagaimana dinyatakan UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 47 ayat 1, yaitu: “Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.” Dilihat dari statusnya, sekolah swasta ini terdiri dari:

a) Disamakan

¹⁵ Muhammad Nur, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, “Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4, no. 1 (2016): 95.

- b) Diakui
- c) Terdaftar
- d) Tercatat

2) Ditinjau dari sudut tingkatan:

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari:

- a) Pendidikan Dasar, terdiri dari Sekolah Dasar/Masrasah Ibtidaiyah dan SMP/MTs.
- b) Pendidikan Menengah, terdiri dari SMU dan Kejuruan dan Sekolah Aliyah.
- c) Pendidikan Tinggi, terdiri dari Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas.

Selain jenjang pendidikan tersebut, ada juga diselenggarakan pendidikan Pra Sekolah, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sebelum memasuki Pendidikan Dasar.

3) Ditinjau dari sifatnya:

- a) Sekolah umum, yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk dalam hal ini adalah SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA.
- b) Sekolah kejuruan, yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian

tertentu, seperti: SMEA, MPAK (MAK), SMK, STM dan sebagainya.

c. Fungsi Sekolah

Sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh keluarga, juga mengembangkan potensi anak. Lebih detail tentang fungsi sekolah dipaparkan sebagai berikut.¹⁶

1) Mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan

Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Menurut Suwarno, fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Peningkatan kecerdasan, keterampilan dan sikap sebagai modal penting untuk pembangunan. Selain itu dengan pengalaman belajar, segala tindakan yang dilakukan akan berdasarkan ilmu. Hal ini yang akan membuat hidup lebih bermutu.

2) Spesialisasi

Spesialisasi sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Menurut Suwarno fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang

¹⁶ Nurdyansyah dan Andiek Widodo, *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*, (Sidoarjo: Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017), 31-33.

spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, menurut Karsidi penerapan sistem sekolah dimaksudkan untuk memberikan kompetensi-kompetensi jenis keahlian dalam lahan pekerjaan yang terbentang luas kompleksitasnya. Siswa menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya dan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai modal untuk mencari nafkah.

3) Efisiensi

Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisiensi, sebab:

- a) Apabila tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik hanya dipikul oleh keluarga, maka hal ini tidak akan efisien, karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, serta banyak orang tua tidak mampu melaksanakan pendidikan,
- b) Karena pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang tertentu dan sistematis,
- c) Di sekolah dapat dididik sejumlah besar anak secara sekaligus.

4) Sosialisasi

Menurut Suwarno fungsi sekolah yakni sebagai proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk

sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Proses sosialisasi di dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, merupakan fungsi yang cukup penting karena tugas pendidikan sekolah adalah mensosialisasikan pentingnya persatuan melalui beberapa macam mata pelajaran.

5) Konservasi dan transmisi kultural

Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan (transmisi kultural) kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya adalah anak didik. Vembriarti memaparkan fungsi sekolah sebagai transmisi kebudayaan masyarakat, diantaranya:

- a) Transmisi pengetahuan dan keterampilan
- b) Transmisi sikap, nilai-nilai dan norma-norma.

6) Transisi dari rumah ke masyarakat

Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua, maka ketika memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat.

7) Kontrol sosial

Sekolah memiliki sistem pengendalian sosial. Secara mendasar pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam

masyarakat atau suatu sistem pengendalian, yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan.

3. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Secara etimologi dalam bahasa Arab istilah pendidikan berasal dari tiga akar kata utama, yakni “*tarbiyah*” yang berarti upaya pemaksimalan seluruh potensi peserta didik, “*ta’lim*” yang berarti proses transfer ilmu, dan “*ta’dib*” yang berarti pendidikan akhlak.¹⁷ Dalam kosakata bahasa Indonesia pendidikan berakar dari kata “didik” yang berarti pimpin, pelihara, ajar.¹⁸ Sedangkan menurut para ahli definisi dari pendidikan yaitu:¹⁹

- 1) Muhammad Naquib Al-Attas merumuskan pendidikan itu merupakan suatu proses untuk *ta’dib*, yang di dalamnya memuat *ta’lim*, *tazkiyah*, *tahfidz*, *tadris*, dan pembiasaan.
- 2) Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan merupakan suatu kegiatan humanis yang bertujuan membentuk insan manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab berdasarkan cipta, rasa, dan karsa yang dikembangkannya.
- 3) Ahmad D. Marimba merumuskan pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹⁷ A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia...*, 232.

¹⁸ Ananda Santoso dan Slamet Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa...*, 91.

¹⁹ Muhammad Nur, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, “Manajemen Sekolah dalam...,” 96-97.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia (tenaga pendidik kepada peserta didik) guna memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yang diliputi dengan pengembangan karakter. Supaya menjadikan peserta didik yang semula tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, dan kurang cerdas menjadi cerdas.

b. Macam-macam Pendidikan

Dalam proses penyelenggaraan dan pengimplementasiannya, pendidikan dibedakan dan digolongkan sesuai jenisnya. Jenis pendidikan tersebut tentunya disesuaikan dengan latar belakang pelaksanaan, siapa objek yang dituju, serta tujuan akhir pelaksanaannya. Adapun secara lebih rinci mengenai macam-macam pendidikan, yaitu sebagai berikut.²⁰

1) Pendidikan umum

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

2) Pendidikan kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam

²⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 30-31.

bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu.

3) Pendidikan akademik

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

4) Pendidikan profesi

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.

5) Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).

6) Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

7) Pendidikan khusus

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

c. Manfaat Pendidikan

Pendidikan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh suatu negara tentu saja memiliki manfaat yang besar bagi peradaban. Dalam UUD 1945 Negara Indonesia termuat bahwasanya negara harus menjamin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengingat begitu penting dan besarnya manfaat pendidikan untuk kemajuan bangsa. Adapun secara lebih rinci mengenai manfaat pendidikan, yaitu sebagai berikut.²¹

1) Pendidikan membantu seseorang membangun karir yang baik.

Dengan pendidikan, seseorang dapat mempelajari keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai posisi tinggi di industri tertentu. Dengan pendidikan, seseorang juga dapat membentuk hubungan yang berguna dengan orang lain yang berhubungan dengan industri mereka.

²¹ Nila Ulfiatunnisa, "Manfaat Pendidikan untuk Masa Depan Perspektif Assatidz Pondok Pesantren Darunnajah Cipinang Bogor," *Darunnajah: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 73-75.

- 2) Pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan etika kerja yang baik. Pendidikan membantu seseorang untuk memahami tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta membantu memahami pentingnya kerja keras dan disiplin.
- 3) Pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka. Pendidikan membantu seseorang untuk belajar bagaimana memecahkan masalah dan berpikir secara kritis. Hal ini membantu seseorang untuk mengurangi risiko salah dalam membuat keputusan.
- 4) Pendidikan membantu seseorang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang lain.
- 5) Pendidikan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka. Misalnya, untuk mempelajari teknologi, serta memahami bagaimana menggunakannya secara efektif.
- 6) Pendidikan membantu seseorang untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Pendidikan dapat membantu seseorang untuk memahami cara manage atau mengatur waktu dan meningkatkan produktivitas.
- 7) Pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan kreatif. Pendidikan membantu seseorang untuk belajar bagaimana berpikir secara kreatif dan menemukan solusi yang inovatif dalam suatu masalah.

- 8) Pendidikan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Yaitu dengan membantu seseorang untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, serta meningkatkan keterampilan kolaborasi.
- 9) Pendidikan membantu seseorang untuk berpikir secara global. Dimana seseorang dapat memahami dan menghargai budaya lain, serta membantu seseorang untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas.
- 10) Pendidikan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan pendidikan, bisa membantu seseorang untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah, dan membantu untuk menanggapi perubahan dengan cara yang cepat dan tepat

4. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Secara etimologis akhlak (Bahasa Arab) adalah jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Farid Ma'ruf sebagaimana yang dikutip Mustofa bahwa akhlak adalah kehendak manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa menimbulkan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dilihat dari sudut istilah (Terminologi para ahli pendapat, namun intinya sama yaitu tentang perilaku manusia, seperti menurut pendapat Hamzah Ya'qub dalam tulisan Titin Mariatul menyimpulkan akhlak adalah “etika” yang menyelidiki mana yang baik

dana mana yang buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.²²

Kata akhlak dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan akhlak, moral, etika, watak, budi pekerti, perangai dan kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Menurut Moh. Abd. Aziz al Khuly dalam buku *adab al-nabawi* yang dikutip dari tulisan Titin Mariatul, akhlak adalah sifat jiwa yang sudah terlatih demikian kuatnya sehingga mudahlah bagi yang empunya melakukan suatu tindakan tanpa dipikir dan direnungkan lagi.²³

Menurut Ibnu Maskawaih akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melakukan suatu perbuatan dan gampang untuk dilaksanakan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang.²⁴

²² Titin Mariatul Qiptiyah, "Pendidikan Akhlak pada Anak 'Perspektif Al-Qur'an dan Hadist,'" *Childhood Education : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (May 9, 2020): 108–20, <https://doi.org/10.53515/CJI.2020.1.2.108-120>.

²³ Qiptiyah, 121.

²⁴ Haris Budiman, "Dampak Penayangan Film Remaja di Televisi Terhadap Akhlak Remaja di Kelurahan Way Dadi Baru Sukarame Kota Bandar Lampung," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 1 (October 16, 2018): 81, <https://doi.org/10.24042/alidarrah.v8i1.3082>.

b. Macam-macam Akhlak

Akhlak terbagi menjadi dua yaitu *akhlaqul karimah* dan *akhlaqul mazmumah*. Adapun penjelasan secara lebih rinci mengenai akhlak karimah dan akhlak *mazmumah* tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Akhlaqul karimah* (akhlak mulia). Akhlak *karimah* adalah akhlak yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Akhlak *karimah* berarti tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah (akhlak *karimah*) dilahirkan berdasarkan sifat-sifat dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁵
- 2) *Akhlaqul mazmumah* (akhlak tercela). Akhlak *mazmumah* adalah akhlak yang jahat dan perbuatan yang keji tanpa mengenal halal dan haram, serta tidak berperi kemanusiaan, menjauhkan mereka dengan Allah dan sebaliknya mendekatkan mereka dengan neraka atau perbuatan yang dapat mencelakakan diri ataupun orang lain.²⁶

c. Manfaat Mempelajari Ilmu Akhlak

Mustafa Zahri berpendapat bahwa dalam perbaikan akhlak bertujuan untuk membersihkan hati dari kotoran hawa nafsu dan amarah yang menyelimuti hati sehingga hati akan menjadi bersih dan suci sebagaimana cermin yang dapat menerima cahaya dari Tuhan. Dari

²⁵ Titin Mariatul Qiptiyah, "Pendidikan Akhlak Pada...", 122.

²⁶ Rusli Malli, "Peran Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Binaan Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Pilar* 11, no. 1 (2020), 143.

uraian tersebut maka manfaat dari mempelajari ilmu akhlak yaitu sebagai berikut.

- 1) Memberikan bimbingan kepada manusia agar mampu membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan.

Ilmu akhlak dapat menentukan ciri-ciri dari perbuatan baik dan buruk sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara lahiriyah maupun bathiniyah. Akhlak yang baik seperti, pemaaf, sabar, dermawan dan kasih sayang. Sedangkan akhlak yang buruk seperti, menyekutukan Allah, melakukan *bid'ah* yang dilarang Allah, sombong, dengki, adu domba dan pelit. Dengan demikian, maka akan tercipta seorang individu yang mulia dan dapat membawa kemaslahatan kepada lingkungan sekitarnya.²⁷

- 2) Mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk.

Pembentukan pribadi yang berakhlak mulia meliputi semua aspek dari dalam diri manusia baik lahir maupun batin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya: Artinya: *“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-*

²⁷ Ahmad Hawasyi, *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja*, (Jakarta: PT. Naraya Elaborium Optima, 2020), 6-7.

ngadakan terhadap Allah apa yang kamu ketahui” (QS. Al-A’raf: 33).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan perbuatan yang keji dan perbuatan dosa serta melanggar hak tanpa ada alasan yang benar. Ini berarti bahwa umat manusia diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk menurut Allah.²⁸

- 3) Bermanfaat dalam menyucikan diri manusia dari perilaku yang maksiat dan dosa.

Kehidupan setiap manusia dihiasi dengan perbuatan baik dan buruk, sehingga akan berpengaruh kepada hubungan dengan sesama Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Jika perbuatan yang muncul adalah perbuatan yang baik, maka akan melahirkan tatanan masyarakat yang berbudi luhur dan berjiwa mulia. Dampaknya yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis, tentram, sejagtera dan bahagia di dunia hingga akhirat.²⁹

- 4) Mengarahkan berbagai aktivitas manusia dalam segala bidang kehidupan.

Akhlak sangat memengaruhi cara berperilaku orang yang berilmu. Seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki akhlak yang mulia, ia akan senantiasa memanfaatkan segala pengetahuannya kepada kebaikan. Sebaliknya, seseorang yang berilmu namun tidak berakhlak, maka ia akan menggunakan

²⁸ Hawasyi, 6.

²⁹ Hawasyi, 7.

ilmunya untuk melakukan kemaksiatan dan kemudlaratan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah SAW bersabda: kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.*” (HR. Turmudzi).³⁰

5. Pendidikan Akhlak

a. Pengertian Pendidikan Akhlak

Seperti yang telah peneliti simpulkan sebelumnya bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia (tenaga pendidik kepada peserta didik) guna memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yang diliputi dengan pengembangan karakter. Supaya menjadikan peserta didik yang semula tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, dan kurang cerdas menjadi cerdas.

Adapun kata akhlak dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan akhlak, moral, etika, watak, budi pekerti, perangai dan kesusilaan.³¹ Dapat pula disebutkan bahwa kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan.³² Menurut Moh. Abd. Aziz al Khuly dalam buku *adab al-nabawi* yang dikutip dari tulisan Titin Mariatul, akhlak adalah sifat jiwa yang sudah terlatih demikian kuatnya sehingga

³⁰ Hawasyi, 7.

³¹ Ananda Santoso dan Slamet Priyanto, 14.

³² Ahmad Hawasyi, *Kajian Akhlak dalam...*, 10.

mudahlah bagi yang empunya melakukan suatu tindakan tanpa dipikir dan direnungkan lagi.³³

Setelah kita telah mengetahui penjelasan tentang pendidikan dan akhlak, maka penulis dapat mengidentifikasi pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, untuk mencapai pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan akhlak secara formal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan akhlak manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia yang tempat mereka hidup.

Pendidikan akhlak juga diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbupotensi tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan akhlak berarti juga menumbuhkan personalitas (kepribadian) dan menanamkan tanggung jawab.

b. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Dalam hal ini ruang lingkup pendidikan akhlak tidak berbeda dengan ruang lingkup ajaran Islam yang berkaitan dengan pola hubungannya dengan Tuhan, sesama makhluk dan juga alam semesta.³⁴ Pada dasarnya pendidikan akhlak yang diajarkan Al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti

³³ Titin Mariatul Qiptiyah, "Pendidikan Akhlak pada...", 108-120.

³⁴ M. Sholihin dan M. Rosyid Anwar, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 27.

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian dan mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.³⁵

c. Fungsi Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak sangat penting bagi kehidupan manusia, baik pada diri seseorang, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dengan pendidikan akhlak, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera. Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa fungsi yang mengembangkan kehidupan manusia yang berpendidikan, yaitu manusia paripurna (*insan kamil*), yang diharapkan dan dicita-citakan. Fungsi pendidikan akhlak dapat membentuk lima fungsi ganda pada manusia, fungsi tersebut adalah:³⁶

1) Fungsi psikologis

Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun psikis. Maka pendidikan akhlak bertugas untuk mewujudkan (mengantarkan) manusia yang lemah fisik dan psikis tersebut menjadi manusia yang dewasa, bertanggung jawab dan mandiri.

³⁵ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 158.

³⁶ Nata, 154-155.

2) Fungsi paedagogis

Pendidikan akhlak menumbuhkan dan mengembangkan potensi dasar manusia, sehingga dapat tumbuh berkembang dan pada akhirnya menjadi manusia yang sebenarnya (insan kamil).

3) Fungsi filosofis

Pendidikan akhlak diselenggarakan untuk dapat mewujudkan manusia yang berjiwa baik, berilmu pengetahuan tinggi, dan berpikir secara luas.

4) Fungsi sosiologis

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan dasar, dan memiliki insting untuk hidup bermasyarakat (*homo socius*). Pendidikan akhlak mengharapkan agar potensi dasar tersebut dapat berkembang, berjalan luwes sehingga terjadi interaksi positif.

5) Fungsi agama

Manusia adalah makhluk yang dikenal dengan homo religius (makhluk beragama), artinya bahwa manusia mempunyai kemampuan dasar ketuhanan yang dibawa sejak lahir (fitrah) oleh karena itu Allah SWT. menurunkan nabi dan Rasul untuk mengembangkan fitrah keagamaan tersebut lewat jalur pendidikan dan pengajaran.

6. Pendidikan Akhlak di Sekolah

a. Pengertian Pendidikan Akhlak di Sekolah

Seperti yang sebelumnya telah disimpulkan mengenai penjelasan tentang pendidikan dan akhlak, maka penulis dapat

mengidentifikasi pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, untuk mencapai pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan akhlak secara formal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan akhlak manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia yang tempat mereka hidup.³⁷

Pendidikan akhlak juga diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbupotensi tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan akhlak berarti juga menumbuhkan personalitas (kepribadian) dan menanamkan tanggung jawab.

Adapun seperti yang telah peneliti simpulkan sebelumnya bahwasanya, pengertian sekolah yaitu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secara meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.³⁸

Sehingga berdasarkan beragam definisi yang telah dipaparkan tersebut mulai dari definisi pendidikan akhlak, dan pendidikan sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan di sekolah yaitu

³⁷ Rusli Malli, "Peran Pengurus Himpunan Mahasiswa...", 143.

³⁸ Muhammad Nur, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, "Manajemen Sekolah dalam...", 95.

suatu usaha dan upaya untuk menanamkan dan mengajarkan mengenai pengajaran akhlak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah kepada para peserta didik. Baik itu dalam bentuk pembelajaran formal maupun non formal dalam bentuk pembiasaan maupun suri tauladan, dengan tujuan agar terimplementasikannya akhlak mulia yang dapat diamalkan peserta didik di dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Bentuk-bentuk Pendidikan Akhlak di Sekolah

Pengelolaan pembiasaan terhadap akhlak mulia di sekolah dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan atau pengawasan. Pengelolaan dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut harus mencakup pada semua sub sistem dalam pembiasaan akhlak mulia tersebut di atas, dan dituangkan dalam program-program. Adapun program-program sebagai wujud bentuk-bentuk pendidikan akhlak di sekolah, yaitu sebagai berikut.³⁹

1) Keteladanan

Yang dimaksud dengan system keteladanan/*uswatun hasanah* di sini adalah upaya oleh setiap orang untuk memberikan contoh akhlak karimah kepada orang lain tentang apa dan bagaimana melakukan sesuatu dan bagaimana memperlakukan orang lain. Keteladanan merupakan inti dari semua program. Program ini dilakukan oleh semua warga sekolah. Yaitu pimpinan sekolah (kepala sekolah, wakil, pembina-pembina), para guru (wali

³⁹ Imam Bukhori, *Proses Pendidikan Akhlak Mulia Melalui Pembiasaan di Sekolah*, (Jakarta: Madrasah Tsanawiyah Negeri 12, 2021), 16.

kelas, guru mata pelajaran dan guru BP), murid, petugas administrasi (TU dan staf), karyawan (tukang kebun, petugas keamanan dan pesuruh).

Prinsip yang harus dipegang dalam memberikan tauladan agar mempunyai pengaruh kepada komunitas sekolah lebih besar dan cepat adalah prinsip 3 M: Mulai diri sendiri, Mulai dari yang kecil dan biasa, Mulai sekarang juga. Program ini diarahkan untuk memberikan contoh baik kepada murid. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembelajaran akhlak mulia adalah menyentuh pada aspek afektif murid. Aspek afektif murid akan mudah tersentuh dengan pembelajaran perilaku, penerapan langsung dengan percontohan ini. Dalam pepatah arab dikatakan "*lisanul hal afshohu min lisanil maqol*", nasehat dengan perilaku lebih bermakna dari pada ucapan.

Adapun untuk mewujudkan program ini, pelaksanaannya dapat dengan melakukan beberapa upaya antara lain:⁴⁰

- a) Semua warga sekolah harus menampilkan perilaku penuh nilai akhlak karimah kepada orang lain, tentang bagaimana berjalan yang berakhlak, bagaimana menyapa, salam, berjabat tangan, bicara, menegur, menyuruh, menasehati, bahkan bagaimana marah dan memarahi yang berakhlak dan lain sebagainya.
- b) Memperlakukan orang lain dengan akhlak karimah, sehingga orang lain bisa respek dan menerima apa yang dikatakana dan anjurkan.

⁴⁰ Bukhori, 17.

c) Berkomitmen untuk saling mengingatkan. Untuk mencapai komitmen ini perlu diadakan kesepakatan bersama tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan. Hal ini tentu terkait dengan bagaimana memberi pemahaman dan pengertian kepada warga sekolah. Yaitu pengertian tentang berakhlak mulia itu sendiri.

2) Pembelajaran

Yang dimaksud dengan program pembelajaran di sini adalah program bagaimana memberikan pemahaman, keyakinan dan konsep serta teori tentang akhlak karimah. Pembelajaran akhlak karimah dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum. Secara khusus berarti memberikan materi khusus tentang akhlak karimah misalnya pembelajaran akidah akhlak, memasukkan pada materi MOS (Masa Orientasi Siswa baru), ceramah-ceramah, BP, dan sebagainya.

Pembelajaran secara umum berarti memasukkan, menghubungkan dan mengaitkan nilai-nilai akhlak karimah ke dalam semua materi pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler. Program ini diarahkan untuk penyadaran berperilaku akhlak karimah, melalui pemberian pemahaman dan pengertian tentang akhlak mulia. Prinsip yang digunakan adalah dengan merubah pemahaman dan mengisi aspek kognitif diharapkan dapat merubah perilaku, yaitu menuju perilaku yang berakhlak mulia.

Adapun pelaksanaannya dapat dengan melakukan usaha-usaha antara lain:⁴¹

- a) Pengajaran akidah-akhlak lebih dioptimalkan.
- b) Memasukkan materi akhlak pada masa orientasi siswa baru (MOS).
- c) Menggalakkan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam dan lainnya, serta mengisinya dengan ceramah-ceramah tentang akhlak.
- d) Memberdayakan penyelenggaraan sholat Jum'at di sekolah.
- e) Pemberdayaan pertemuan-pertemuan murid pada berbagai kesempatan untuk mensosialisasikan tentang program pembudayaan akhlak.
- f) Penampilan kata-kata hikmah di tempat-tempat umum secara permanen ataupun temporer secara berkala dan terencana. Berkala berarti menuntut adanya pergantian materi dan penampilan sehingga menarik dan menimbulkan suasana baru.
- g) Pemberdayaan pertemuan wali kelas dan guru bidang studi
- h) Memberikan panduan praktis tentang sopan-santun murid dalam setiap aktifitas dan setiap interaksi dengan orang lain/siapapun.
- i) Penempelan pamflet-pamflet, stiker, *icon-icon* dan lain-lain di tempat-tempat strategis.

⁴¹ Bukhori, 18-19.

Adapun pelaksana program ini sebaiknya melibatkan organisasi siswa di samping guru-guru. Dengan pelibatan siswa diharapkan siswa dapat mengambil pelajaran tentang kepemimpinan, keteladanan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

3) Pengontrolan

Yang dimaksud dengan pengontrolan adalah program bagaimana pengawasan dilakukan, untuk menjamin diterapkannya perilaku akhlak mulia dalam setiap tindakan sesuai dengan rencana dan aturan yang ada. Yaitu program bagaimana setiap pribadi peka untuk mengingatkan dan menegur lalu menunjukkan terhadap perilaku yang tidak berakhlak yang terjadi dihadapannya, di manapun dan kapanpun berada. Program pengontrolan diharapkan menimbulkan hukuman sosial bagi perilaku tidak berakhlak. Pelanggar akhlak akan malu sendiri tanpa ditegur/diingatkan.

Program ini diarahkan untuk mengarahkan dan meluruskan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh semua unsur guru, murid, karyawan maupun para pimpinan. Yaitu masing masing individu menjadi pengontrol bagi dirinya sendiri, temannya, mitra kerjanya dan bahkan atasannya. Semua diciptakan dalam suasana semangat *amar makruf nahi munkar*, yakni mencegah tindakan yang tidak berakhlak dan menganjurkan, mengajak serta mendorong kepada perilaku yang sesuai dengan akhlak mulia.

Untuk itu semua diperlukan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan bersifat mengikat. Pelaksanaannya adalah dengan melakukan usaha antara lain:⁴²

- a) Memberikan teguran, memberi tahu, mengingatkan dan menasehati kepada orang lain yang jelas-jelas berperilaku yang tidak berakhlak, dengan cara yang bijak.
- b) Mendorong orang lain untuk mau melakukan hal yang sebagaimana disepakati bersama.
- c) Mendorong orang lain untuk mengoreksi/mengingatkan diri kita jika ada kekurangan.
- d) Dalam memberikan nasehat atau mengingatkan yang harus diperhatikan adalah didasari tujuan yang baik, ikhlas karena Allah, tidak mempermalukan kepada yang diingatkan atau dinasehati, dilakukan cara yang baik, tidak memfonis salah, sebab mungkin ia punya alasan yang kuat untuk melakukan kesalahannya atau bahkan karena ketidaktahuannya, serta tunjukkan bahwa menegur itu karena sayang bukan benci.

Pengontrolan juga dimaksudkan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan program itu sendiri. Sehingga dengan ini keistiqomahan jalannya program dapat tercapai. Dengan demikian diharapkan budaya sekolah menjadi terwujud.

⁴² Bukhori, 20.

4) Pembinaan

Yang dimaksud pembinaan di sini adalah program bagaimana memberikan bimbingan dan pembinaan kepada murid yang punya masalah dalam memperbaiki dirinya, sulit berubah, atau murid bermasalah karena sebab tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Program ini diarahkan untuk penyembuhan perilaku menyimpang yang disebabkan karena adanya faktor khusus yang perlu kajian dan pendekatan atau tindakan khusus.

Pelaksanaan program ini adalah konselor, atau wali kelas bahkan dengan mekanisme konferensi kasus, yang dikoordinasikan guru bimbingan dan penyuluhan (BP). Pelaksanaannya antara lain dengan melakukan langkah-langkah:⁴³

- a) Mengidentifikasi murid yang bermasalah.
- b) Mengadakan pendekatan dari hati ke hati kepada murid yang bermasalah.
- c) Mengidentifikasi masalah dan mengatasinya.
- d) Memberikan perhatian yang lebih (sosial dan spiritual).
- e) Memberikan pemantauan terhadap perkembangan perilakunya.
- f) Mereferral/mengalih tangankan kepada yang kompeten.
- g) Memberikan tindakan hukuman.

5) Evaluasi

Yang dimaksud evaluasi adalah program bagaimana mengevaluasi, menilai dan mengoreksi semua pelaksanaan sistem

⁴³ Bukhori, 21.

tersebut secara terus menerus untuk menentukan kebijakan/program baru yang lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan terus menerus, berdasarkan fakta dan data terhadap suatu masalah. Program ini diarahkan untuk menjamin berlakunya/terlaksananya semua program pembudayaan akhlak karimah secara *istiqomah* sehingga menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang dipertahankan akhirnya menjadi budaya.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh tim yang sengaja dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sub-sub sistem atau komponen-komponen yang ada di sekolah. Menurut hemat penulis program pembiasaan akhlak mulia menuju budaya sekolah ini tidak cukup ditangani oleh perangkat dan mekanisme kerja sekolah yang ada selama ini. Tapi perlu ada bentukan tim khusus menangani pembiasaan ini. Sekalipun orang-orang yang mengisi tim tersebut adalah perangkat-perangkat yang ada di sekolah itu sendiri. Setidaknya ada kesan kuat terhadap keseriusan penanganan dengan terbentuknya tim tersebut, di samping untuk menghindari benturan dan ketidakpastian tanggung jawab.

Masalah perubahan kebiasaan dan penciptaan budaya harus ditangani serius dan sungguh-sungguh. Bukan sampingan program sekolah. Adapun setelah tercipta budaya secara mantap maka tim dapat saja dibubarkan kemudian diambil alih semua tugas dan wewenangnya oleh perangkat sekolah. Itu tidak menjadi soal. Tapi untuk tahap pembentukan budaya tetap perlu adanya tim khusus.

Untuk melaksanakan evaluasi itu sendiri, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:⁴⁴

- a) Mengadakan *brainstorming*/ curah pendapat.
- b) Mengidentifikasi permasalahan.
- c) Menganalisis masalah dengan teknik tertentu.
- d) Mencari alternatif pemecahan.
- e) Menentukan tindakan pemecahan masalah.
- f) Merencanakan tindakan.
- g) Melakukan tindakan.
- h) Mengevaluasi tindakan, dan seterusnya sebagai suatu siklus.

Dengan pelaksanaan evaluasi seperti ini diharapkan pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia menuju pembudayaan sekolah dapat berjalan dengan baik dan istiqomah. Untuk melakukan semua program tersebut membutuhkan kemauan yang kuat dari terutama pimpinan sekolah. Dari kemauan itu pimpinan dapat mentransformasikan kepada semua warga sekolah. Komitmen dan dukungan guru, murid dan warga sekolah lainnya mutlak dibutuhkan. Sehingga semua unsur sekolah dapat sinergis bekerja sama untuk mewujudkan budaya sekolah, yaitu budaya berakhlak mulia pada semua aktivitas pembelajaran, untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

⁴⁴ Bukhori, 22-23.

c. Manfaat Pendidikan Akhlak di Sekolah

Menurut sebuah penelitian, anak lebih cepat menguasai pelajaran matematika dibanding dalam membentuk kepribadian yang baik. Butuh sekitar 12 tahun untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Tidak hanya belajar melalui buku, anak-anak juga butuh keteladanan dan praktek yang berkelanjutan. Maka dari itu, pendidikan akhlak harus diutamakan sedari kecil karena membutuhkan waktu lama dan dilakukan sebelum akhlaknya terlanjur terbentuk menjadi akhlak yang buruk.

Berdasarkan pemaparan tersebut betapa pentingnya penanaman pendidikan akhlak kepada peserta didik di sekolah, dengan manfaat yang diperoleh di antaranya yaitu sebagai berikut.⁴⁵

1) Akhlak mencerminkan kualitas pribadi

Banyak anak bangsa yang mampu lulus pendidikan akademik dengan nilai yang hampir sempurna. Tapi sayangnya hanya sedikit yang memiliki akhlak yang baik. Hasilnya, mereka tidak bisa berkembang dengan baik di dunia pasca sekolah. Ada yang bermalas-malasan saat bekerja. Ada yang suka menyelipkan uang perusahaan. Ada yang menerima uang hadiah dari mitra, padahal jelas tertulis pada lembar surat perjanjian perusahaan tidak boleh menerima hadiah dari mitra. Perilaku-perilaku tersebut jelas merugikan orang lain.

⁴⁵ Saiful Bahri, *Membumikan Pendidikan Akhlak: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2023), 25-26.

2) Akhlak mampu mengendalikan pergaulan

Seperti yang sudah banyak beredar di berita-berita online dan televisi, banyak anak muda yang tawuran, bunuh diri, narkoba, seks bebas dan masih banyak lagi penyimpangan perilaku lainnya. Hal tersebut tidak akan terjadi jika para orang tua sadar betul pentingnya pendidikan akhlak. Bagaimana caranya mengendalikan amarah? Bagaimana caranya berinteraksi dengan sesama? Bagaimana sebaiknya kita bersikap dengan orang yang berbeda pendapat dengannya? Semua itu penting diajarkan kepada anak-anak kita.

3) Akhlak mampu mempengaruhi ketentraman keluarga

Tidak mungkin ketentraman akan terjadi dalam hubungan sebuah keluarga jika anggotanya tidak memiliki akhlak yang baik. Jika antara anggota saling mencela, menghardik, ataupun saling menjatuhkan. Maka ketentraman keluarga akan sulit diwujudkan

4) Akhlak mempengaruhi kemajuan bangsa

Ini jelas terlihat di sekitar kita. Bagaimana banyak wakil daerah yang tidak sungguh-sungguh menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak juga para aparat negara yang malah sibuk memperkaya diri sendiri dengan korupsi uang rakyat. Hal itu tidak akan terjadi jika akhlak mereka baik. Uang rakyat akan kembali kepada rakyat. Aspirasi rakyat akan disampaikan dengan baik. Demo pun bisa dicegah agar tidak terjadi.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu diperoleh berbagai data mengenai penelitian yang relevan, yakni sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herisfina Fauziah pada tahun 2018 dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 3 Cisauk”.⁴⁶ menunjukkan bahwa peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan cukup optimal di dalam beberapa peran seperti peran komite sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator. Namun, sebagai badan pengontrol dan pendukung perannya belum optimal. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian di peran komite, dan juga metod yang digunakan metode kualitatif. perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang menggunakan tingkat SMPN sedangkan peneliti bersubjek pada tingkatan SMKN.
- 2) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Abdillah pada tahun 2017 dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang”.⁴⁷ Menyimpulkan sebagai pertimbangan (identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, menyelenggarakan rapat RAPBS, identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat), sebagai pendukung (memantau kondisi ketenagaan pendidikan sekolah, mobilisasi guru sukarelawan dan non tenaga pendidik untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, evaluasi dukungan sarana prasarana, memantau kondisi anggaran), sebagai

⁴⁶ Herisfina Fauziah, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 3 Cisauk,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 24.

⁴⁷ Aziz Abdillah, “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 85.

pengontrol (memantau organisasi sekolah, memantau angka mengulang dan bertahan siswa di sekolah), sebagai mediator (penghubung antara komite sekolah dengan dewan pendidikan, mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah). Belum maksimalnya koordinasi dengan masyarakat dan orang tua murid. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian di peran komite, metode yang digunakan metode kualitatif, dan juga subjek penelitian dalam tingkatan SMAN sederajat. peredaannya terletak pada focus pembahasan dalam penelitian tersebut dilingkup pendidikan kalau peneliti focus di pendidikan akhlak.

- 3) Penelitian yang dilakukan Lilys Febriana pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang”.⁴⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangatlah baik, bisa dilihat dari peningkatan sarana prasarana yang ada di sekolahan. komite sekolah di MAN 1 Palembang tidak luput dari beberapa peranannya diantaranya sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan juga sebagai mediator. maka dari itu komite sekolah sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan akhlak di MAN 1 Palembang. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian di peran komite, metode yang digunakan metode kualitatif, dan juga subjek penelitian dalam tingkatan MAN sederajat. peredaannya terletak pada focus pembahasan dalam penelitian tersebut dilingkup pendidikan kalau peneliti focus di pendidikan akhlak.

⁴⁸ Lilys Febriana, “Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang,” *Jurnal PAI Raden Fatah*, vol. 1, no .2, (2019), 34.

- 4) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaryl Gapari dengan judul “Implementasi Manajemen Pendidikan Akhlak di MAN 1 Lombok Timur”.⁴⁹ Upaya membentuk akhlak yang baik pada diri siswa, diperlukan pengaturan yang sistematis, seperti halnya manajemen pengajaran atau proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran, sekolah perlu memperhatikan pengembangan dan memperbaiki mental pada peserta didik. Dengan demikian, diperlukan sebuah manajemen khusus yang dikembangkan pihak sekolah untuk membangun akhlak siswa. Untuk itu, diperlukan langkah terpadu dari berbagai pihak, baik sekolah, guru, siswa, organisasi kesiswaan, maupun peran serta orang tua siswa. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana program implementasi pendidikan akhlak pada siswa dalam konteks manajemen pendidikan akhlak yang diberlakukan oleh Sekolah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur sebagai upaya preventif/represif dalam mengatasi bentuk-bentuk kenakalan siswa/remaja yang biasa terjadi di sekolah dan juga termasuk diluar sekolah karena yang paling penting juga dalam menanggulangi proses kenakalannya. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian di pendidikan akhlak, metode yang digunakan metode kualitatif, dan juga subjek penelitian dalam tingkatan MAN sederajat. peredaannya terletak pada focus pembahasan dalam penelitian tersebut dilingkup implementasi manajemen kalau peneliti focus di peran komite.

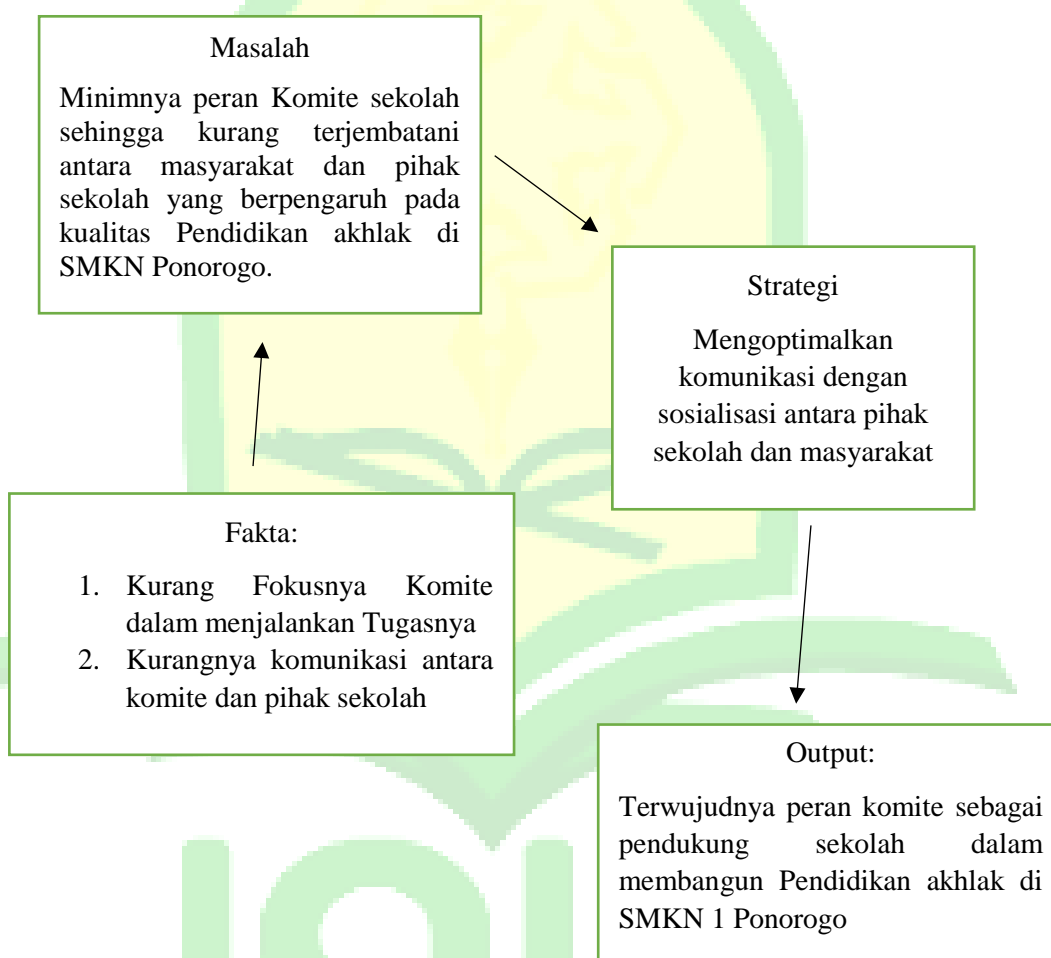
⁴⁹ Muhammad Zaryl Gapari, “Implementasi manajemen pendidikan akhlak di MAN 1 Lombok Timur,” *Jurnal manajemen dan ilmu pendidikan*, vol. 1, no. 1, (2019).

- 5) Berdasarkan penelitian Suraya dan Kasman, dengan judul “Analisis Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima.”⁵⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima sudah berjalan dengan baik, dengan beberapa indikator. Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima tak luput dari beberapa perannya tersebut. Kesimpulannya bahwa komite sekolah sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian di peranan komite dan juga pendidikan akhlak, metode yang digunakan metode kualitatif, dan juga subjek penelitian dalam tingkatan MAN sederajat. peredaannya terletak pada focus pembahasan dalam penelitian tersebut dilingkup pendidikan kalau peneliti focus di pendidikan akhlak.

⁵⁰ Suraya, Kasman, “Analisi peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima,” *Journal of management*, vol. 5, no. 3, (2022): 335-342.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bentuk model konseptual yang menggambarkan korelasi dengan berbagai faktor yang sebelumnya telah diidentifikasi menjadi suatu problem yang penting.⁵¹ Dalam penelitian skripsi ini, kerangka pikirnya yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁵¹ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), 127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu upaya dan usaha-usaha yang dilakukan untuk lebih memfokuskan diri kepada suatu bidang yang akan diinternalisasikan pemahamannya secara mendalam, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian suatu data dan informasi sesuai dengan titik jenuh yang diinginkan.¹ Sedangkan jenis penelitian adalah pembagian dan pengklasifikasian tipe-tipe sebuah proses penelitian, yang disesuaikan dengan karakter teori dengan kebutuhan yang terjadi di dalam milieu penelitian.²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menemukan fenomena yang ada dalam lingkungan sosial dengan mengedepankan pada interaksi antara peneliti dengan sumber penelitian.³ Fenomenologi merupakan kajian penelitian kualitatif dengan melihat fenomena alami yang ada didepan mata serta mengamatinya dalam keadaan sadar dan mengaitkannya dengan pengalaman yang ada.⁴ Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran dan juga strategi komite dalam meningkatkan mutu pendidikan akhlak di SMKN 1

¹ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), 46.

² Arifah, 49.

³ Abdul Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2021).

⁴ Hadi, Asrori, and Rusman.

Ponorogo serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

Rancangan pada penelitian ini yaitu dengan memilih peserta didik yang ikut sebagai organisasi rohis untuk mengetahui seberapa faham peserta didik terkait dengan pendidikan akhlak, dan juga melakukan wawancara kepada komite sekolah, kepala sekolah dan juga guru pendidikan akhlak. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tes, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yakni wawancara semi terstruktur kepada kepala sekolah, komite, guru pendidikan akhlak, dan juga ketua organisasi rohis yang dipilih sebagai responden, dengan maksud menjadikannya sebagai sumber data dalam penelitian peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian, beserta nama jalan dan nama kotanya. Lokasi penelitian juga dapat diartikan lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam lokasi ini terdapat unsur dimensi tempat, dimensi pelaku, dan dimensi kegiatan. Sehingga dapat ditegaskan bahwasanya lokasi penelitian ini sama halnya dengan milieu penelitian, namun terdapat campur tangan seorang peneliti untuk mengatur, merubah, dan merekonstruksikannya.⁵

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 288.

Dalam Penelitian ini Peneliti mengambil lokasi disalah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yaitu di SMKN 1 Ponorogo yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.10, Krajan, Pakunden, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63416. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMKN tersebut karena Pendidikan akhlak disana sangat bagus padahal di tingkatan SMKN.

Sedangkan waktu penelitian adalah seluruh rangkaian masa ketika peneliti melakukan proses, perbuatan, atau keadaan berada di dalam menjalankan sebuah tahapan penelitian yang telah dikehendaki dan direncangnya. Di mana waktu penelitian sebelumnya sudah direkonstruksikan oleh peneliti sesuai kapabilitas yang hendak dicapai.⁶ Dalam hal ini waktu penelitian akan dilaksanakan selama sebulan mulai 01 Agustus sampai dengan 17 September 2024 bertepatan dengan jam kerja komite sekolah di SMKN 1 Ponorogo.

C. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁷

⁶ Sugiyono, 289.

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 112

Menurut Suharsimi Arikunto data adalah seluruh fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi, informasi sendiri merupakan hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk suatu kepentingan. Suharsimi Arikunto, juga mendefinisikan pengertian sumber data, dia menjelaskan bahwa sumber data ialah subjek darimana data-data diperoleh atau darimana penelitian ini mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan.⁸

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dibagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang sumber datanya langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Data primer penelitian ini adalah Komite Sekolah dan Lembaga pendidikan SMKN 1 Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pelengkap yang digunakan untuk melengkapi data primer penelitian seperti dari buku, jurnal, artikel dan data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),.107

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini, dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain penelitian (tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan) dan justifikasi. Secara lebih sederhana prosedur merupakan padanan yang menandakan sederet kegiatan, cara, langkah, ketentuan, perhitungan, proses hingga tugas yang akan dilaksanakan dalam serangkaian aktivitas eksekusi yang bertujuan untuk meraih *goal* yang diinginkan seperti hasil, produk atau akibat.⁹

Pada penelitian skripsi ini, prosedur penelitiannya dijabarkan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut.¹⁰

1. Prosedur persiapan penelitian

Persiapan yang dilaksanakan peneliti ketika hendak menjajaki milieu penelitian mulai dari yang pertama, persiapan berbentuk konseptual berkenaan dengan tujuan pengumpulan data, variabel yang akan diukur, instrumen yang hendak digunakan, serta sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan. Tujuan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui peran komite sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, strategi komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, serta

⁹ Kelvin Adha Bilqis Ibrahim dan Dian Gustina, "Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Android untuk Brand Clothing Sand Beach dengan Skema Diskon Menggunakan Hungarian Algorithm," *Universitas Persada Indonesia Y.A.I*, Volume 5, Nomor 1 (2021), 54.

¹⁰ Adhi Kusumastuti, et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 110-114.

faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo.

Kemudian persiapan yang berupa teknis dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan instrumen yang akan digunakan dalam melakukan pengumpulan data mengenai instrumen wawancara, alat dokumentasi, dan alat perekam suara. Selain itu juga menyiapkan alat-alat berupa buku, catatan lapangan, dan jurnal harian.

Dan yang terakhir persiapan aspek administratif yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum melakukan pengumpulan data. Pertama, adanya surat izin dari pihak terkait untuk mempermudah dan memperlancar jalanya pengumpulan data, yakni dari IAIN Ponorogo. Selain itu di samping untuk mempermudah dan memperlancar dalam pengumpulan data, juga akan membantu meningkatkan rasa aman bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Serta yang kedua, memperoleh izin dari pihak yang berwenang atau memperoleh izin dari tempat yang akan digunakan dalam pengumpulan data, yakni dari SMKN 1 Ponorogo.

2. Prosedur pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data yang telah ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang akan digunakan. dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan observasi terhadap kinerja komite SMKN 1 Ponorogo,

kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk menggali data mengenai peran komite sebagai pendukung sekolah dalam membangun pendidikan akhlak, dan melakukan dokumentasi sebagai bukti sekaligus sebagai penguat dari data yang sebelumnya telah dikumpulkan.

3. Prosedur pelaporan penelitian

Tahap pelaporan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh peneliti untuk melaporkan beragam data dan analisis yang ditemui selama kajian penelitian ke dalam bentuk laporan skripsi, yang sesuai dengan format penelitian skripsi dari lembaga instansi yang menaungi peneliti. Dengan tata urutan pelaporan yang juga disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan proses penelitian, yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penarikan gambaran besar data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang data tetapkan.¹¹ Secara rinci penjelasan mengenai beberapa teknik pengumpulan data penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau monumental yang dibuat seseorang. Adapun teknik analisis dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka memperoleh hal yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumentasi ini bisa dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber tertulis.¹²

2. Interview (Wawancara)

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara antara sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan diracang sebelumnya.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) 158.

¹³ Sugiyono Op., Cit. hal 231

SMKN 1 Ponorogo (Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Guru pendidikan akhlak) diberi pertanyaan terkait dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan akhlak.

3. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang terusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁴

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan perkataan atau tidak disertai dengan komunikasi lisan. Pada umumnya teknik observasi melibatkan panca indra penglihatan terhadap data visual, ataupun indra lain seperti pendengaran, sentuhan, serta penciuman.¹⁵ Bisa berupa kegiatan rapat rutin sekolah, proses pembelajaran, keadaan lingkungan sekolah, dan kegiatan lainnya. Namun dalam pengamatan penelitian di SMKN 1 Ponorogo peneliti tidak melibatkan diri dalam objek yang diamati.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 226

¹⁵ Djuju, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.199.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir dalam tulisan Ahmad Harjali, mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”¹⁶

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan untuk merangkum data yang telah diperoleh dan memilah data pokok penelitian yang akan memfokuskan pada hal-hal penting dari penelitian sehingga data yang didapat lebih jelas.

2. Validasi

Validasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh dengan keadaan lapangan yang sebenarnya.

3. Penyajian data

Sekumpulan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dari berbagai sumber data yang terkait dengan penelitian yang dapat ditarik kesimpulannya. Penyajian data dengan metode kualitatif deskriptif dengan metode ini diharapkan data yang diperoleh akan terorganisasi sehingga data yang telah tersaji mudah dipahami.

¹⁶ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 84

4. Verifikasi data

Proses verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam analisis data. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan mengenai data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti data yang valid sehingga dapat menguatkan hasil dari penelitian serta memperjelas dalam memahami data hasil dari penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan mengecek kembali data yang sudah didapat terhadap sumber data yang sama namun dengan teknik yang berbeda.¹⁷ Pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai cara seperti observasi, wawancara, dokumen, dan data pendukung lain (data sekunder). Dengan dilakukannya pengecekan keabsahan penelitian peneliti mendapat data yang akurat dan sistematis.

Keabsahan data adalah konsep penting yang perlu diperbaharui dari kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan dari keabsahan temuan (kredibilitas data) tersebut dapat diadakan pengecekan dengan menggunakan teknik-teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitiannya, yang dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun pada penelitian ini, pengecekan keabsahan penelitiannya yaitu sebagai berikut.¹⁸

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, (Yogyakarta: Penerbit Alfabeta, 2019).

¹⁸ Arikunto, 250.

1. Pengamatan yang tekun

Meningkatkan ketekunan adalah melakukan pengamatan secara langsung dengan cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data yang diperoleh dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

2. Triangulasi

Triangulasi dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya dengan menggunakan data yang telah diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi kuesioner.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan jenis triangulasi sumber dan data. Triangulasi data merupakan pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan metode yang sama, sedangkan teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

H. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek penelitiannya, sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.¹⁹ Adapun secara lebih rinci mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahapan sebelum lapangan

Tahapan yang harus dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian lapangan yakni mengatur konsep dan langkah penelitian, menetapkan lokasi penelitian, menyelesaikan perizinan dengan lokasi tempat penelitian, mengamati lokasi penelitian, menetapkan responden, mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk penelitian, membuat instrumen penelitian dan memahami serta menjaga etika saat penelitian.

2. Tahapan penelitian lapangan

Peneliti mencatat setiap hal dan informasi yang didapat selama penelitian dan selalu aktif dalam penelitian di lapangan serta dalam proses mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap komite sekolah, kepala sekolah, guru pendidikan akhlak di sekolah tersebut.

3. Tahapan analisis data

Tahap analisis data bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti

¹⁹ Indra Jaya Krisna Gede Prabowo et al, "Pengembangan Sistem Mobile Application Berbasis Android untuk Referensi Belajar PAI Santri Sekolah Tsanawiyah," *Jurnal Teknologi Pendidikan UNY* 2, no. 1 (2021): 10.

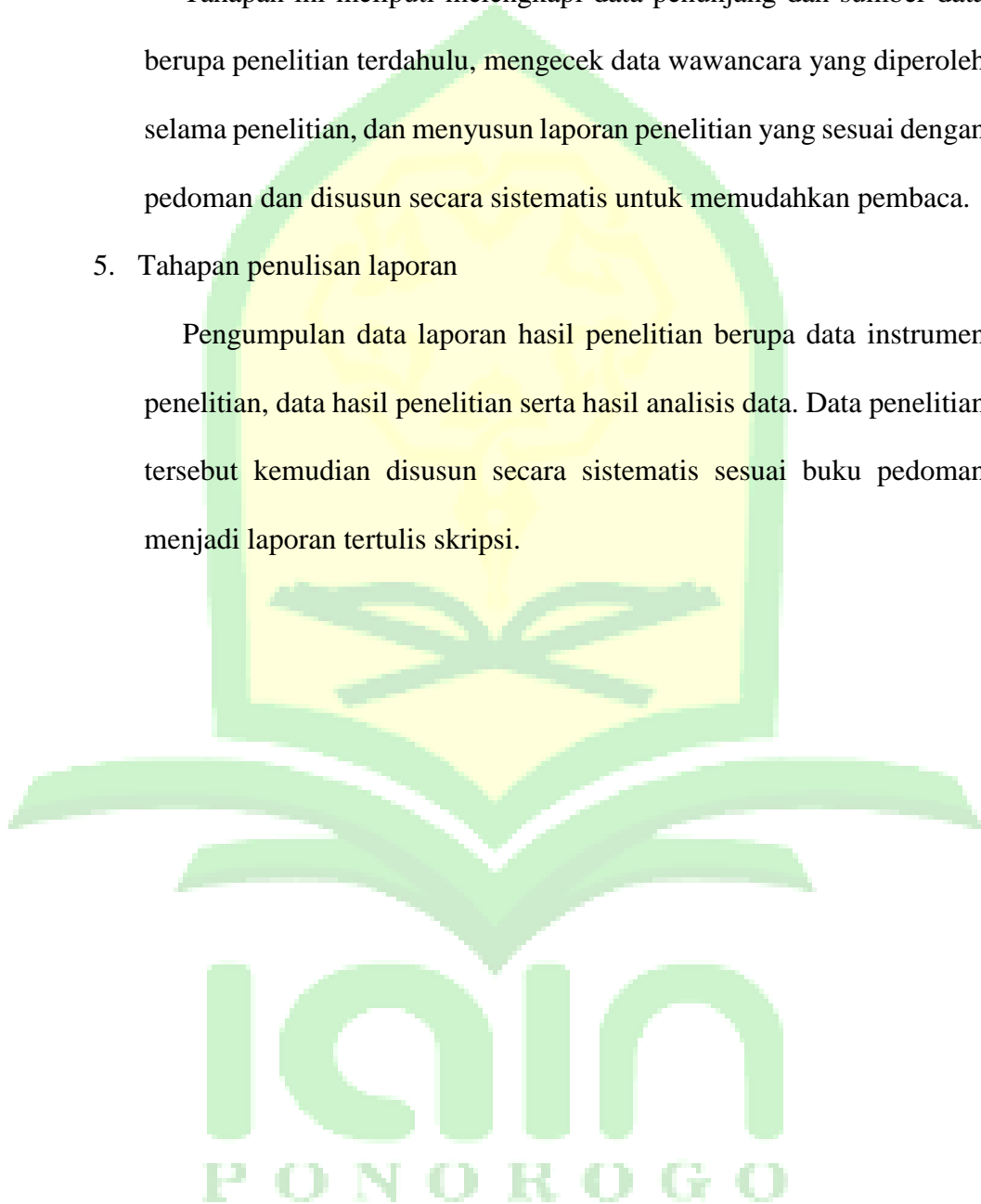
menyajikan data dan membuat kesimpulan mengenai hasil penelitian. Data yang akan dianalisis berupa data hasil wawancara.

4. Tahapan penelitian hasil laporan

Tahapan ini meliputi melengkapi data penunjang dan sumber data berupa penelitian terdahulu, mengecek data wawancara yang diperoleh selama penelitian, dan menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan pedoman dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca.

5. Tahapan penulisan laporan

Pengumpulan data laporan hasil penelitian berupa data instrumen penelitian, data hasil penelitian serta hasil analisis data. Data penelitian tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai buku pedoman menjadi laporan tertulis skripsi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Belakang

1. Sejarah SMKN 1 Ponorogo

SMK Negeri 1 Ponorogo, sekolah kejuruan yang dulunya didirikan pada tanggal 1 Januari 1969. Awal mulanya sekolah ini berdiri merupakan sekolah cabang/filial dari SMEA Madiun yang dulu dinamai SMELA (Sekolah Menengah Lanjutan Atas) Madiun. Kepala sekolah yang pertama yaitu M. Soedarman, BA. Beliau adalah kepala sekolah perbantuan dari Madiun. Sekolah yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 10 ini masih termasuk bangunan China yang jaman dulu dijuluki sebagai tanah gendom. Pada tahun 1969, SMELA diubah namanya menjadi SMEA. Lalu SMEA ini disahkan menjadi sekolah negeri pada tanggal 4 Mei 1974. Setelah itu SMEA diubah lagi menjadi SMK.

Sekolah Menengah Kejuruan ini memiliki jurusan yang pertama kali yaitu Tata Buku, Tata Usaha, Tata Niaga. Tanggal 7 April 1997 Sekolah Menengah Kejuruan ini mengalami perubahan dari SMKTA menjadi SMK, serta perubahan tata kerja SMK maka SMEA Negeri 1 Ponorogo berganti menjadi SMK Negeri 1 Ponorogo berlaku sejak 2 Juni 1997.

Pada masa jabatan Kepala Sekolah ke-3, Jurusan Perkantoran, Akuntansi, Manajemen Bisnis mengalami perubahan kurikulum pada tahun 1999-2001, Jurusan Program Perkantoran diganti menjadi

Sekretaris, Manajemen Bisnis menjadi Penjualan. Pada kurikulum 2004/2005 SMK Negeri 1 Ponorogo menambahkan program baru Multimedia (Teknik Informatika dan Komunikasi). Pada kurikulum ini menjadi 4 Program Keahlian yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Penjualan, dan Multimedia. Pada tahun pelajaran 2008/2009 SMK Negeri 1 Ponorogo menambahkan Program baru yaitu Program Keahlian RPL (Rekayasa Perangkat Lunak). Pada tahun pelajaran 2022/2023 SMK Negeri 1 Ponorogo menerapkan kurikulum merdeka, dengan merubah nama pada Program Keahlian Multimedia menjadi Desain Komunikasi Visual.

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga

Didalam sebuah lembaga pastinya memiliki beberapa visi, misi, dan tujuan lembaga yang mana sebagai pedoman dalam membina suatu lembaga tersebut. Begitupun dengan SMKN 1 Ponorogo, berikut visi, misi, dan tujuan lembaga dari SMKN 1 Ponorogo:

a. Visi Sekolah

“Mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan berstandar nasional/internasional, Berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional dengan berlandaskan Iman & Taqwa (IMTAQ).”

b. Misi Sekolah

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri dengan berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAQ).

2) Menyiapkan calon wirausahawan.

- 3) Menjadikan SMK yang mandiri dan profesional.
- 4) Menjadikan SMK sebagai sumber informasi.

3. Profil singkat Sekolah

SMKN 1 Ponorogo merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Ponorogo yang ber Akreditasi A dengan nilai 93 dan berNPSN 205101000, yang ber Alamat di Jalan Jendral Sudirman No.10 Desa Krajan/Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur 63416. Sekolah tersebut memiliki luas lahan sekolah dan bangunan sekitar 5400 m² / 820 m² ber sertifikat.

B. Deskripsi Data

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Membangun Pendidikan Akhlak di SMKN 1 Ponorogo

Peran komite sekolah sebagai pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, khususnya di SMKN 1 Ponorogo dalam hal membangun pendidikan akhlak. Dalam aspek yang pertama, komite sekolah memberikan dukungannya dalam bentuk keterbukaan dan pemberian ruang terhadap SMKN 1 Ponorogo, dalam melaksanakan kegiatan kependidikan. Baik itu dukungan untuk akses kegiatan pembelajaran, maupun dukungan dalam hal pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Komite disini ada dua unsur, unsur yang pertama dari masyarakat, masyarakat di sini adalah masyarakat yang peduli dengan pendidikan Kemudian yang kedua juga dari orang tua atau wali jadi kita ambil dua itu nah kemarin itu yang di bagian sinikan sudah lulus, nah kita orientasinya juga belakang sekolah yaitu jalan abi manyu. Masalahnya kenapa kita ambil atau kita minta lingkungan Jalan Abi Manyu juga menjadi komite dan sampai sekarang itu ketuanya di Jalan Abi Manyu namanya Pak Yamin. Terus kenapa kok termasuk jalan itu kita pedulikan daerah ataupun warga di sekitaran Jalan Abi Manyu karena akses kita untuk siswa semua siswa rata-rata dari belakang yaitu Jalan Abi Manyu, makanya kita sangat peduli dengan Jalan Abi Manyu termasuk kita juga waktu saat Fitriah, waktu Idul Adha kemudian atau kegiatan-kegiatan di lingkungan Abimanyu kita sering dilibatkan. Jadi begitu salah satunya itu pendekatan warga dan pendekatan emosional.”⁷⁸

“Dari satu ya kita komite ada enam antara masyarakat dengan orang tua wali juga menjadi kolaborasi menjadi pengurus komite dan mungkin tambah 1 unsur lagi yaitu lingkungan. Kita berusaha apa istilahnya eh menjiplak moto, kan moto kita Tri Murti. Nah ternyata ini juga penting. Kenapa lingkungan juga kita tetap melibatkan lingkungan, tetap merepotkan juga lingkungan. Kita itu sering merepotkan lingkungan dengan kegiatan yang contoh mungkin ada kegiatan malam, otomatis lingkungan juga direpotkan, otomatis mau nggak mau kita juga harus merangkul lingkungan. Jadi kalau saya bilang bukan 2 unsur lagi, tapi jadi 3 unsur, orang tua, masyarakat, dan lingkungan.”⁷⁹

Dalam aspek yang kedua, komite sekolah memberikan dukungannya dalam bentuk pengupayaan dan penyepakatan rincian anggaran yang diajukan oleh pihak sekolah kepada komite sekolah, sehingga kemudian program-program pendidikan akhlak yang sebelumnya diajukan oleh komite maupun pihak sekolah itu sendiri, dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

⁷⁸ Transkrip Wawancara Kode 01/W/Kom.Pen/17-09-2024/001.

⁷⁹ Transkrip Wawancara Kode 01/W/Kom.Pen/17-09-2024/008.

“Begini, di sini peran komite sangat luar biasa artinya sangat peduli sangat memotivasi kami dan juga bukan hanya itu juga tapi juga berkaitan dengan anggaran. Terus terang saja di sini kaitan dengan akhlak ada eee khususnya untuk kelas 10 itu namanya sekolah. Apa istilahnya sekolah ngaji gitu soalnya jadi setelah KBM khususnya hari Jum’at biasanya selepas solat Jum’at itu ada bimbingan baca tulis Al-Qur’an, jadi setiap kelas itu ada satu Ustadzah yang mendampingi anak-anak berkaitan dengan pembinaan berkaitan dengan ini baca tulis Al-Qur’an yang di mana ini salah satu usaha kami kerja sama dengan komite. Nah kaitan dengan pembiayaan ini juga istilahnya by komite jadi anggaran untuk itu dari komite termasuk sangat mendukung sekali berkaitan. Khusus anggaran kami bisa berjalan sejauh ini dan sukses ini karena dukungan dari komite. termasuk lomba-lomba itu sebagian besar didukung oleh komite. Walaupun ada juga dari BOS, kita ada 3 anggaran yang pertama dari BOS, BPOPP dan terakhir adalah komite, ini kolaborasi tanpa ini mungkin kita tidak bisa maksimal prestasi.”⁸⁰

Dukungan komite sekolah terhadap SMKN 1 Ponorogo khususnya dalam hal pengalokasian dan penyepakatan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan akhlak tersebut, diwujudkan dalam bukti konkrit berupa kehadiran komite sekolah dalam setiap pembahasan kegiatan, maupun kehadiran dalam hal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan komite dan para anggota komite (wali murid). Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Enggak kalau paling saya ambil contoh komite pendukung misalnya waktu kita ada perpisahan kemudian purnawiyata beliau hadir, itu adalah dukungannya. Untuk perpisahan dan purnawiyata adalah dari siswa termasuk kepanitiaan adalah dari siswa. Dari siswa dilaksanakan oleh siswa pelaporannya juga oleh siswa.”⁸¹

⁸⁰ Transkrip Wawancara Kode 01/W/Kom.Pen/17-09-2024/002.

⁸¹ Transkrip Wawancara Kode 01/W/Kom.Pen/17-09-2024/003.

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Prayitno selaku anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya porsi yang diberikan oleh sekolah itu sudah sangat lebih dari cukup ya, dimana kami dari anggota komite khususnya wali murid selalu diajak untuk kerja sama demi memberikan pendapat kami terkait pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo ini. Apalagi setiap awal semester baru dan juga di awal tahun ajaran baru, seingat saya selalu diadakan rapat komite, untuk merumuskan program-program pendidikan di SMKN 1 Ponorogo, termasuk yang berkaitan dengan program pendidikan akhlak.”⁸²

Kemudian dukungan yang senantiasa diberikan oleh komite sekolah kepada SMKN 1 Ponorogo tersebut, tak lepas dari upaya untuk saling menjalin tali silaturahmi, sehingga menghasilkan dukungan yang berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk yang pertama yang paling utama sebenarnya silaturahmi, kuncinya itu silaturahmi kita sampaikan program atau rencana program di sekolah ini kemudian kalau memang ada kekurangan nah pertanyaan nego nih, atau yang rusak kan yang memperjuangkan itu ada komite. Contoh di 2023 Kemarin kita itu kan rencana *player* kita sampaikan ke komite bahwa kita mau mengadakan atau membangun gedung ini, sementara kita rencana ada tiga. Nah yang lantai 1 itu untuk parkir tidak mungkin kita minta bantuan ke pemerintah, awalnya kan parkir yang sebelah kanan roboh nah kemudian kita sampaikan alasannya itu, dan kita sampaikan juga rencana plan ke depan seperti apa termasuk bangun ini. Nah *alhamdulillah* komunitas setuju dan *alhamdulillah* waktu itu penggalangan dana itu bukan yang 10. Kalau saat ini kan masih kelas 10 waktu itu karena sudah lama tidak ada pembangunan makanya kita melibatkan seluruh wali ataupun orang tua dari istri, saya hadirin SMA 1 ini walaupun sumbangan dari wali itu berbeda kelas 10 kelas 11 sama kelas 12 itu berbeda nominalnya. *Alhamdulillah* sudah terwujud

⁸² Transkrip Wawancara Kode 04/W/Kom.Pen/17-09-2024/001.

lantai 1 itu semuanya dari komite, nah itu salah satu bentuk secara fisik. Jadi sangat berdampak sekali karena terus terang saja antara kami dengan komite itu sangat mendukung jadi ada permasalahan sekecil apapun segera kita sampaikan, termasuk rekrutmen GTT anggaran juga dari komite soalnya dana BOS dan BPOPP tidak boleh untuk itu.”⁸³

Proses yang ditempuh untuk melaksanakan dukungan dari komite sekolah terhadap penyelenggaraan program pendidikan akhlak tersebut, dilaksanakan melalui pertemuan rapat dengar pendapat. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku Wakil Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Proses yang saya tempuh ya langsung saja kita sepakati bersama komite sekolah, mengenai apa saja program yang ingin dikembangkan terkait dengan pendidikan akhlak. Dari kesepakatan tersebut kemudian kita sepakatkan dan bahas kembali mengenai kebutuhan anggaran, karena ya wajar lah mbak ya namanya program berjalan, kan pasti butuh dana. Pokoknya semua itu harus sepakat dan fiks dulu.”⁸⁴

Adapun secara lebih lanjut mengenai langkah yang ditempuh untuk melaksanakan dukungan dari komite sekolah terhadap penyelenggaraan program pendidikan akhlak melalui rapat dengar pendapat tersebut, dilakukannya penyepakatan bersama antara komite sekolah dengan pihak SMKN 1 Ponorogo. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku Wakil Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Nah, langkah yang ditempuh ini lebih ke bentuk kegiatannya kan ya, jadi setelah program yang diusulkan oleh komite tadi tersepakati bersama rincian anggaran dananya, maka langsung kita eksekusi. Misal komite sekolah menghendaki adanya program baca tulis Al-Qur’an *one day one juz*, nah kita rumuskan berapa dana yang dibutuhkan untuk menggaji guru yang mau menangani itu, lalu

⁸³ Transkrip Wawancara Kode 01/W/Kom.Pen/17-09-2024/004.

⁸⁴ Transkrip Wawancara Kode 02/W/Kom.Pen/17-09-2024/003.

langsung kita carikan hari dan waktu mana yang efektif untuk kegiatan tersebut. Misalnya lagi ketika peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Adha, nah kita rumuskan dan sepakati juga bersama komite mengenai berapa nominal iuran yang dibutuhkan bagi seluruh siswa, untuk latihan berkorban, atau untuk membeli hewan kurban. Setelah semuanya fiks baru kita eksekusi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ketika Idul Adha, sekalian dengan pembagiannya kepada seluruh siswa. Kan itu juga termasuk ke dalam pendidikan akhlak.”⁸⁵

Setelah melalui serangkaian bentuk serta wujud dukungan dari komite sekolah terhadap pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, maka dilaksanakannya pengimplementasian program pendidikan akhlak yang dicanangkan. Dalam hal ini program pendidikan akhlak terbagi menjadi dua aspek. Pada aspek yang pertama, program pendidikan akhlak di SMKN 2 Ponorogo ini, dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan dan pembudayaan karakter positif terhadap para siswa. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam selaku guru PAI sekaligus pembina Rohis SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya apa yang sudah di progamkan dari komite dan sekolah dan manajemen sekolah itu, kalau kita kan hanya tinggal menindaklanjuti saja. Saya kira seperti itu dan programnya kan juga banyak-banyak juga yang kesepakatan yang dilakukan oleh komite, maupun dengan manajemen sekolah, termasuk kalau dalam hal peringatan akhlak dan juga kita tentu sinergi juga itu tidak bisa kalau kita melakukan nya sendir-sendiri. Kalau terkait dengan apa PAI kita juga sudah bisa mengetahui, kita ciptakan iklim dan sebagai iklim yang religius bagaimana, kita sampaikan bagaimana ketika kita bertemu dengan bapak ibu guru. Misalkan kalau bertemu bapak ibu harus jabat tangan dan sebagainya, meskipun itu dengan bapak ibu guru yang misalkan belum mengajar ke kelas tersebut, itu anak-anak juga kita tekankan jangan cuek istilahnya ya, Kan juga ada sebagian anak-anak yang karena tidak mengajar di kelasnya akhirnya dianggap bukan gurunya. Seringkali kita sampaikan kepada anak-anak, saya kira ini juga apa ya salah satu untuk

⁸⁵ Transkrip Wawancara Kode 02/W/Kom.Pen/17-09-2024/004.

pembelajaran juga seperti itu, kemudian saling menghormati sama teman juga *Insyallah* juga sudah kondusif indikasinya, *Insyallah* tidak ada tukaran atau berantem secara frontal satu dengan yang lain saya kira tidak ada, itu yang non formal. Yang formal kita tentu apa namanya secara berkala kan juga ada evaluasi. Bagaimana misalkan oh ini perkembangan akhlaknya, sikap, dan sebagainya, dan juga di nilai raport pun juga kita ambilkan dari situ. Kita juga wewenang kita untuk terutama dari PAI dari PKN dari BP itu yang punya kewenangan untuk menentukan nilai sikap anak ini, saya kira sudah terkait langsung dengan akhlak terutama sikap, kurang lebih seperti itu.”⁸⁶

“Kalau kita kan namanya pembinaan keimanan ketaqwaan, kita bentuknya lebih ke sana. Jadi satu semester dua kali saja yaitu pembinaan IMTAQ biasanya dilakukan dilaksanakan satu semester 2 kali, di awal semester dan di akhir semester, diikuti seluruh siswa, dan biasanya itu kita menghadirkan narasumber dari luar. Karna kalau dari kita kayak sudah terbiasa kan dan daya tariknya anak-anak itu kurang, makannya kita hadirkan narasumber dari luar biasanya kayak motivator, dan kegiatan ini rutin dilaksanakan. Harapan kita dengan kegiatan ini agar anak-anak biar lebih patuh, menghormati, dan sebagainya, harapannya kesana. Cuma namanya orang banyak anak kan ya, kita kan tidak bisa berharap *perfect* untuk 100%. Mungkin adalah satu duanya mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira juga apa namanya ya dinamikanya di situlah, tapi secara umum *alhamdulillah* bagus.”⁸⁷

Sedangkan pada aspek yang kedua, program pendidikan akhlak di SMKN 2 Ponorogo ini, dilaksanakan dalam bentuk peringatan hari besar keagamaan, khususnya pada hari-hari besar Islam. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Ada banyak sekali dan ini sangat berkaitan dengan organisasi Rohis, untuk salah satunya adalah pondok ramadhan. Kemudian kegiatan ada yang di sekolah, ada juga kegiatan yang di luar sekolah. Di luar sekolah itu ambil contoh kurban Idul Adha, kita selalu keluar ke sekolah-sekolah, nanti dari SMP itu juga ke masyarakat, sekalian kita juga promosi jadi di SMP. Dan rencana tahun kemarin kita 2022 di Sukorejo 2, kemudian kemarin 2023 di Pulung 3, sekarang ini 2024 itu rencana di Ngebel 1. Jadi semua pihak dilibatkan mulai dari

⁸⁶ Transkrip Wawancara 05/W/Pend.Akh/17-09-2024/001.

⁸⁷ Transkrip Wawancara 05/W/Pend.Akh/17-09-2024/006.

guru dan siswa, utamanya anak Rohis, dan juga di sana itu nanti ada event seperti takbir bersama, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya. Semua berkaitan dengan penggalan itu, dari kami jadi sana istilahnya cuma bertempatan saja. Kayak nanti hewan kurban terus peralatan-peralatan itu dari kami semua, sana sebagai tuan rumah yang terlibat bersedia ditempati dan dilibatkan, khususnya biar ada kolaborasi antara Rohis SMK 1 Ponorogo dengan Rohis yang di libatkan atau sekolah yang di tempati.”⁸⁸

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam selaku guru PAI sekaligus pembina Rohis SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Proses pengimplementasiannya ya seperti yang saya contohkan di awal tadi. Misalnya seperti kegiatan latihan kurban dan shalat berjama’ah Idul Adha di area sekolah, kemudian kegiatan mengaji di pagi hari atau yang dikenal dengan istilah *one day one juz*, maupun pembiasaan-pembiasaan lain yang berkaitan dengan akhlak. Seperti shalat dzuhur dan ashar berjamaah, seminar anti *bullying*, dan sebagainya.”⁸⁹

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Adik Alfinia selaku perwakilan siswa sekaligus ketua Rohis SMKN 1 Ponorogo, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, selaku ketua Rohis atau yang berkegiatan di Rohis ya kak, program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo ini sudah bagus. Ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang hampir menyentuh semua aspek di lingkungan sekolah. Mulai dari adanya kegiatan *tahfidz* dan *tahsin* yang dibarengkan dengan kegiatan *one day one juz*, kemudian adanya kegiatan shalat berjamaah, terus peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, pondok ramadhan, Idul Adha, dan juga pembiasaan sopan santun seperti berjabat tangan dengan bapak ibu guru ketika memasuki area sekolah.”⁹⁰

“Untuk pendidikan akhlak yang dinaungi roh is itu biasanya kita kerja sama sama guru melalui OSIS mbak, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi seperti kegiatan peringatan hari besar keagamaan.

⁸⁸ Transkrip Wawancara 01/W/Pend.Akh/17-09-2024/009.

⁸⁹ Transkrip Wawancara 03/W/Pend.Akh/14-09-2024/004.

⁹⁰ Transkrip Wawancara 06/W/Pend.Akh/14-08-2024/001.

Adapun untuk kegiatan pendidikan akhlak di luar naungan Rohis itu, semua kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan seperti shalat berjamaah, dan pembiasaan menjaga sopan santun terhadap bapak ibu guru.”⁹¹

Adapun mengenai bukti dari pelaksanaan program kegiatan pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo ini, terbukti dari wujud nyata pelaksanaan kegiatan pendidikan akhlak tersebut, baik dalam bentuk pembiasaan karakter positif, maupun dalam bentuk penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan. Di mana bukti tersebut menjadi wujud konkrit yang harus diketahui oleh ketua komite, dan orang tua selaku anggota komite. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Adik Alfinia selaku perwakilan siswa sekaligus ketua Rohis SMKN 1 Ponorogo, menyatakan bahwa:

“Untuk bukti itu nanti orang tua kami mayoritas sudah mengetahuinya kok mbak. Misal kalau ada kegiatan peringatan hari besar keagamaan kan kita juga selalu memakai pakaian muslim. Terus kan juga sebelumnya ada pemberitahuan iuran juga, misal untuk iuran kurban, iuran donasi bakti sosial, maupun pemberitahuan untuk membawa zakat fitrah. Kadang kita juga telat pulang karena shalat berjamaah dulu di sekolah, jadi orang tua kami mayoritas sudah tahu akan hal itu.”⁹²

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Membangun Pendidikan Akhlak di SMKN 1 Ponorogo

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, khususnya di SMKN 1 Ponorogo dalam hal memberikan aspirasi dalam bentuk usulan kegiatan, masukan terhadap keberlangsungan program, maupun kritik dan saran yang membangun

⁹¹ Transkrip Wawancara 06/W/Pend.Akh/14-08-2024/002.

⁹² Transkrip Wawancara 06/W/Pend.Akh/14-08-2024/004.

terhadap pelaksanaan program pendidikan akhlak. Hal tersebut dilaksanakan oleh komite sekolah, ketika menggunakan haknya ketika dilaksanakannya rapat dengar pendapat komite sekolah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yamin selaku Ketua Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang kita lakukan itu ada tiga, yaitu pemberi pertimbangan atau usulan, kesepakatan, dan pengawasan. Dari segi pemberi pertimbangan, kita selaku komite sekolah memberikan masukan-masukan maupun usulan-usulan mengenai program apa saja yang seharusnya dilaksanakan di SMKN 1 Ponorogo ini, terkait dengan pendidikan akhlak. Misal kita usul adanya kegiatan latihan kurban di ketika Idul Adha, yang dilaksanakan di lingkup area sekolah, yang mencakup shalat Ied bersama, terus nanti ada pembagian daging kurban bersama juga. Kemudian dari segi kesepakatan, setelah kita merumuskan kegiatan Idul Adha tadi, kita memiliki tugas untuk menyepakati atau menyetujui kegiatan itu atau tidak, kemudian kita juga menyepakati berapa besar dana yang digunakan apakah memberatkan siswa atau tidak jika iurannya sekian gitu. Baru di peran yang terakhir yaitu peran pengawasan, jadi dari hasil usulan program, dan besaran dana yang dibutuhkan itu tadi kita awasi. Apakah memang dananya dipergunakan seluruhnya oleh pihak sekolah, atau ada yang dikorupsi. Kalau dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan kegiatan ya *alhamdulillah*, kalau dikorupsi ya kita langsung tindak lanjuti.”⁹³

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku Wakil Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya kinerja yang dilakukan komite sekolah itu sudah cukup baik, karena mereka selalu aktif dalam memberikan saran dan masukan kepada sekolah, agar mengedepankan pendidikan akhlak. Karena ya tau sendiri lah mbak ya, di masa sekarang ini, masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap pendidikan akhlaknya.”⁹⁴

Bentuk kegiatan dalam kaitannya untuk mengimplementasikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan tersebut,

⁹³ Transkrip Wawancara 03/W/Kom.Per/14-08-2024/001.

⁹⁴ Transkrip Wawancara 02/W/Kom.Per/14-08-2024/001.

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berupa rapat dengan pendapat komite sekolah, dengan pihak SMKN 1 Ponorogo yang dilaksanakan setiap awal semester baru atau setiap awal tahun ajaran baru. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Setiap tahun khususnya siswa baru siswa baru itu kita adakan rapat pleno. Nah waktu rapat pleno kita juga apa ya penyampaian program dari sekolah, ada juga program dari komite termasuk penyampaian berkaitan dengan pembangunan akhlak itu, jadi komite kita berikan kesempatan untuk menyampaikan program di rapat pleno komite bersama orang tua. Khususnya jadi komite waktu rapat dinas di awal dan di akhir pembelajaran, maksud saya di awal tahun pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran kita datangkan juga komite untuk menyampaikan apa ya istilahnya di samping program, juga supaya kami apa ya dimotivasi didukung. Nah jadi kita undang komite untuk istilahnya mendampingi kami di rapat dinas di awal, dan di akhir. Kalau di awal kaitan dengan program, nah kalau di akhir itu kaitan dengan evaluasi jadi itu.”⁹⁵

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku Wakil Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Bentuk kegiatannya ya rapat dengar pendapat dan penyampaian usul yang dilakukan di setiap awal semester, maupun di tiap awal tahun ajaran baru. Jadi mereka para komite menyampaikan usulan, aspirasi, pendapat, kritik dan saran, terkait pengembangan pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo ini.”⁹⁶

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yamin selaku Ketua Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan ya biasanya melalui rapat mbak. Jadi setiap awal semester baru, atau awal tahun ajaran baru, pasti ada rapat dengar pendapat dengan komite. Jadi di

⁹⁵ Transkrip Wawancara 01/W/Kom.Per/14-09-2024/004.

⁹⁶ Transkrip Wawancara 02/W/Kom.Per/14-09-2024/002.

situlah kita menyampaikan semua hal ya melalui rapat komite itu tadi.”⁹⁷

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam selaku guru PAI sekaligus pembina Rohis SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Ya sebenarnya kalau terkait sama itu kan lebih kepada ikut menentukan kebijakan tingkat manajemen sekolah. Menurut saya seperti itu, jadi otomatis kalau beliau-beliau para komite terjun langsung kan ya tidak mungkin. Jadi menurut saya lebih kepada ikut menentukan bagaimana kebijakan manajemen sekolah, menurut saya lebih ke sana.”⁹⁸

“Ya kalau itu belum ada, kalau komite itu kan biasanya rapat dengan manajemen sekolah dan nanti yang mengatur beliau akan menentukan kapan rapatnya dan biasanya menyesuaikan lah dengan lembaga bagaimana. Pernah juga sebagian guru saja yang ikut rapat, yang sering mungkin sebagian lah, sebagian itu yang sering, tapi dalam waktu tertentu juga menghadirkan seluruh bahkan seluruh wali murid. Kalau secara khusus dengan pembina keagamaan yaitu belum, lebih pada kebijakan manajemen sekolah secara umum.”⁹⁹

Kemudian melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak SMKN 1 Ponorogo, proses pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dilaksanakan bentuk penyampaian gagasan yang dilakukan oleh seluruh anggota komite sekolah. Dimana keseluruhan anggota komite sekolah, diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya.

Gagasan tersebut dapat berupa penyampaian aspirasi terkait program pendidikan akhlak yang akan dilaksanakan, usulan tentang serapan anggaran dana yang dibutuhkan, kritik untuk mengawasi

⁹⁷ Transkrip Wawancara 03/W/Kom.Per/14-09-2024/002.

⁹⁸ Transkrip Wawancara 05/W/Kom.Per/17-09-2024/004.

⁹⁹ Transkrip Wawancara 05/W/Kom.Per/17-09-2024/005.

pelaksanaan kegiatan, maupun saran yang membangun demi keberlanjutan pelaksanaan program pendidikan akhlak. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Ya seperti itu, kalau dari komite berarti dari orang tua. Pengurus komite itu sebenarnya adalah perwakilan dari orang tua atau wali. Makanya eee komite, pengurus komite itu salah satunya kita libatkan dari unsur orang tua atau wali, jadi terwakili, terwadahi di situ. Nah jadi keputusan apapun, nah nanti kan juga ada pertimbangan dari orang tua yang menjadi pengurus di situ gitu, jadi supaya tidak semua pengurus komite ini dari luar. Maksudnya bukan dari orang tua, jadi kita melibatkan orang tua itu salah satunya tolak ukurnya eh itu. Kalau memang nanti anggarannya terlalu besar, berarti otomatis yang orang tua ini kan bisa bisa meng-*cancel* atau meringankan dari yang besar itu, jadinya dikurangi lah begitu. Jadi tolak ukurnya tetap dari orang tua atau wali.”¹⁰⁰

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yamin selaku Ketua Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Peran wali murid atau anggota komite ya itu, ya peran melalui pemberi pertimbangan itu tadi. Jadi ketika rapat komite, seluruh wali murid diperkenankan untuk menyampaikan usulan mengenai program pendidikan akhlak yang dilaksanakan, termasuk juga bisa menyampaikan usulan terkait anggaran dana yang dibutuhkan. Sehingga terciptanya klop dan sinergitas gitu mbak, agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.”¹⁰¹

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Prayitno selaku anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Saya memaksimalkannya melalui memanfaatkan waktu untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mbak. Jadi ketika rapat komite itu, saya selalu menyampaikan pendapat untuk kebaikan siswa,

¹⁰⁰ Transkrip Wawancara 01/W/Kom.Per/14-09-2024/012.

¹⁰¹ Transkrip Wawancara 03/W/Kom.Per/14-09-2024/003.

sekaligus juga untuk usul keringanan iuran anggaran pelaksanaan program-program yang dibahas di rapat komite itu.”¹⁰²

“Biasanya saya usul mengenai penekanan terhadap program-program yang berkaitan dengan pendidikan akhlak. Apalagi kan siswa sekarang sekolahnya *full day*, sehingga kita selaku wali murid tidak bisa memantau bagaimana ibadah mereka, juga tidak bisa memantau bagaimana perilaku mereka. Oleh karenanya saya tekankan agar pembiasaan pendidikan akhlak seperti shalat berjamaah dan pembiasaan karakter positif, selalu saya usulkan ketika rapat komite itu.”¹⁰³

Peran pemberi pertimbangan yang dimiliki oleh komite sekolah selain melalui penyampaian aspirasi, gagasan, usulan, kritik, dan saran, juga dilaksanakan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menganalisis seberapa besar prosentase keberhasilan program pendidikan akhlak, dapat berjalan baik di SMKN 1 Ponorogo. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Iya cuma kalau evaluasi biasanya di akhir tahun ajaran seperti ini nanti kita akan adakan ee sekitar di bulan Juni, itu evaluasi tahunan walaupun kita juga sampaikan evaluasi bulanan itu ada. Cuma eh apa ya istilah kalau berjalan normal kita lanjut, tapi kalau memang ada permasalahan yang mendesak ya kita adakan evaluasi bulanan walaupun sebenarnya ada agenda untuk rutin di rapat bulanan.”¹⁰⁴

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Sekolah dalam Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

Faktor pendukung merupakan suatu aspek yang memberikan dorongan kemudahan bagi pelaksanaan suatu program, sehingga program

¹⁰² Transkrip Wawancara 04/W/Kom.Per/14-09-2024/002.

¹⁰³ Transkrip Wawancara 04/W/Kom.Per/14-09-2024/003.

¹⁰⁴ Transkrip Wawancara 01/W/Kom.Per/17-09-2024/005.

yang dijalankan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikannya, yakni merupakan suatu aspek yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan suatu program, sehingga program yang dijalankan menjadi tidak maksimal dan tidak terlaksana dengan lancar.

Dalam penelitian ini khususnya mengenai kaitannya peran komite sekolah dalam ikut serta andil dalam pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, tentunya juga terdapat beragam faktor pendukung dan penghambatnya. Secara keseluruhan, faktor pendukung bagi terlaksananya peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo disebabkan oleh rutusnya kesempatan dan keterbukaan yang dijalin oleh pihak SMKN 1 Ponorogo kepada komite sekolah, dalam menyampaikan aspirasi dan kritik serta saran melalui rapat dengar pendapat yang rutin dilaksanakan di awal semester baru ataupun di awal tahun ajaran baru.

Sedangkan secara keseluruhan pula mengenai faktor penghambatnya terletak pada kurangnya kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh komite, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh para anggota komite, sehingga diperlukannya penyesuaian dan penyepakatan bersama setiap kali membahas sesuatu yang berkaitan dengan anggaran pelaksanaan program pendidikan akhlak. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku Wakil Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya ya itu tadi, *Alhamdulillah* komite sekolah selalu terbuka dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun, saran.

Serta yang tak kalah pentingnya mereka selalu mendukung kegiatan pendidikan akhlak, melalui usulan dan sarannya. Untuk faktor penghambatnya sih terletak pada nominal iuran dana ya, karena kita selalu diawasi oleh Dinas Pendidikan, jadi kalau iuran untuk setiap kegiatan pendidikan akhlaknya terlalu kebesaran, nanti kan memberatkan dan dianggap pungli. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita dari pihak sekolah itu bisa sepakat dengan komite, untuk memutar strategi dalam hal kesepakatan anggaran dana.”¹⁰⁵

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yamin selaku Ketua Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai faktor pendukungnya ya terletak pada pihak SMKN 1 Ponorogo yang masih mau dan terus memberikan kesempatan secara rutin kepada kami selaku komite sekolah, untuk menyampaikan usul dan aspirasi melalui rapat komite yang rutin dilaksanakan setiap awal semester baru, maupun setiap awal tahun ajaran baru. Untuk faktor penghambatnya ya terletak pada beragamnya aspek perekonomian para anggota komite atau para wali murid, sehingga kalau kita hendak menyepakati iuran untuk kegiatan pendidikan akhlak, ya kita harus benar-benar berhati-hati, agar tidak memberatkan para wali murid yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah.”¹⁰⁶

Selaras pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Prayitno selaku anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya ya pihak sekolah selalu terbuka terhadap usulan, aspirasi, kritik, dan saan dari kami, terbukti melalui rutusnya pelaksanaan rapat dengar pendapat komite sekolah. Sedangkan untuk faktor penghambatnya mungkin kami kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan akhlak di sekolah. Karena kita wali murid lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan di pekerjaan, sehingga tidak bisa memantau secara berkala mengenai program pendidikan akhlak yang dilaksanakan oleh sekolah.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Transkrip Wawancara 02/W/Fak.Pen/Fak.Peng/17-09-2024/005.

¹⁰⁶ Transkrip Wawancara 03/W/Fak.Pen/Fak.Peng/17-09-2024/005.

¹⁰⁷ Transkrip Wawancara 04/W/Fak.Pen/Fak.Peng/14-09-2024/005.

Adapun menurut siswa selaku objek yang melaksanakan program pendidikan akhlak, menyampaikan bahwa secara garis besar faktor pendukung pelaksanaan program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo terletak pada dukungan sekolah melalui banyaknya kegiatan pendidikan akhlak, baik melalui pembiasaan karakter positif, maupun peringatan hari besar keagamaan Islam. Sedangkan secara keseluruhan mengenai faktor penghambatnya terletak pada respon pribadi masing-masing siswa, karena ternyata masih terdapatnya siswa yang belum terbiasa membudayakan karakter positif, dan belum terbiasa pula melaksanakan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Adik Alfinia selaku perwakilan siswa sekaligus ketua Rohis SMKN 1 Ponorogo, menyatakan bahwa:

“Mengenai faktor pendukung lebih ke dukungan sekolah untuk giat dalam mengadakan kegiatan pendidikan akhlak itu tadi mbak, mulai dari kegiatan peringatan hari besar keagamaan, dan juga pembiasaan sopan santun di lingkungan sekolah. Untuk faktor penghambatnya itu kembali ke pribadi siswa masing-masing, karena masih ada juga siswa yang belum membudayakan berjabat tangan kepada setiap bapak ibu guru yang ditemui di lingkungan sekolah, serta juga kadang masih ada yang bolos tidak ikut shalat berjamaah.”¹⁰⁸

“Proses pendidikan akhlak tersebut dapat diimplementasikan dan dirasakan apabila seluruh siswa terlibat aktif untuk mengikutinya mbak. Misal seperti kegiatan peringatan hari besar keagamaan itu tadi, memang wajib diikuti oleh seluruh siswa yang beragama Islam, jadi semua bisa merasakan kegiatannya. Adapun untuk kegiatan pembiasaan seperti shalat dan berjabat tangan dengan guru, atau menjaga sopan santun, itu kan tergantung dari diri pribadi masing-masing siswa. Sebenarnya pihak sekolah sudah menganjurkan, tapi namanya juga sifat setiap siswa kan beda-beda, jadi ya begitulah kalau ada yang tidak melaksanakan ya tergantung siswanya itu tadi.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Transkrip Wawancara 06/W/Fak.Pen/Fak.Peng/14-09-2024/005.

¹⁰⁹ Transkrip Wawancara 06/W/Fak.Pen/Fak.Peng/14-09-2024/003.

Berdasarkan beragam faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah dipaparkan berdasarkan data hasil wawancara dari berbagai pihak tersebut, dapat dikerucutkan bahwasanya keterbatasan anggaran dana menjadi salah satu aspek utama yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pendidikan akhlak yang diajukan oleh komite sekolah kepada pihak SMKN 1 Ponorogo. Peresolusiannya yakni dengan cara memaksimalkan pembagian plot anggaran dana, serta juga dilakukan dengan cara menghemat anggaran pada bagian yang lain. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Ada si di anggaran ada kendala ada, kadang-kadang setahun kan kegiatan yang sama bisa juga dua kali. Nah itu itu jadi eee apa ya bukan *boomerang* sih tapi kita bisa ngatasinnya ya kita bagi aja atau tidak, juga sampaikan kalau memang mendesak. Seperti kemarin Idul Adha, kemarin kita tawarkan untuk bapak ibu guru juga terlibat di dalamnya khususnya dengan penganggaran. Jadi kita tawarin bapak ibu eh bagi yang berkenan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu berkaitan dengan kegiatan tersebut Idul Adha kemarin dapat satu kambing. Akhirnya kita berikan ke lingkungan jadi gitu.”¹¹⁰

“Oke kita berusaha, kalau memang tidak ada dari guru ya kita usahakan. Istilahnya ya boleh kata eh menghemat, artinya mengurangi ya anggaran yang tersedia yang ternyata juga bisa. Intinya kita ya pandai-pandailah mengatur anggaran karena berkaitan dengan komite itu ya sudah tidak bisa tidak mungkin. Nah kita bisa dikasih minta lagi kan nggak mungkin, tapi yang jelas ee namanya apa ya permasalahan itu jelas ada, tapi selagi permasalahan itu biasa dan kita bisa eh mengatasinya biar kita jalan saja.”¹¹¹

Adapun mengenai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, terletak

¹¹⁰ Transkrip Wawancara 01/W/Fak.Peng/17-09-2024/010.

¹¹¹ Transkrip Wawancara 01/W/Fak.Peng/14-09-2024/011.

pada diri pribadi siswa itu sendiri. Karena siswa di SMKN 1 Slahung berasal dari latar belakang lingkungan sosial yang berbeda, serta dengan pembiasaan akhlak di lingkungan rumah masing-masing yang juga berbeda. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryanto selaku Kepala SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan bahwa:

“Namanya anak dengan jumlah yang cukup besar, saya kira ada kalau satu dua anak yang mungkin ya saya tidak mengatakan nakal agak aneh lah kira-kira, saya kira ada saja yang seperti itu, kan ada juga kadang yang tidak masuk tanpa alasan, atau tidak ada alasan, dan seterusnya juga adalah satu dua anak yang seperti itu. Terkait dengan *tahsin, tahfidz*, biasanya kalau seperti itu nanti kita tindak lanjuti dan kita berikan dengan tugas apa dan seterusnya sebagai gantinya dia tidak mengikuti program *tahsin tahfidz*. Jadi kita apa namanya istilanya gak di tokne (dibiarkan) lah, kalau di tokne di jarne (dibiarkan), kasihan juga yang mengajar.”¹¹²

“Ya namanya akhlak kan suatu yang tidak nampak kan ya, cuma jadi kebiasaan gitu. Saya kira tolak ukurnya ya anak-anak sudah mulai apa namanya nunduk kalau bertemu bapak ibu guru, terus ya menghormati lah, terus anak-anak sama yang lain juga saling menghargainya itu menurut kita sudah menjadi bentuk dari keberhasilan, selain tentu juga ada nilai dari *tahsin tahfidz*. Kalau nilai *tahsin tahfidz* kan ada nilainya sendiri di raport itu kita lakukan tiap akhir semester.”¹¹³

C. Pembahasan

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Membangun Pendidikan Akhlak di SMKN 1 Ponorogo

Komite sekolah di SMKN 1 Ponorogo memainkan peran penting sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak. Dalam konteks ini, peran mereka terfokus pada dua aspek utama, dukungan dalam

¹¹² Transkrip Wawancara 05/W/Fak.Peng/14-09-2024/002.

¹¹³ Transkrip Wawancara 05/W/Fak.Peng/14-09-2024/005.

pelaksanaan kegiatan Pendidikan, dan pengalokasian anggaran untuk program-program pendidikan akhlak.

a. Dukungan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

1) Keterbukaan dan Ruang Dukungan

Komite sekolah di SMKN 1 Ponorogo menunjukkan dukungan yang signifikan dengan memberikan keterbukaan dan akses yang luas bagi sekolah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan. Dukungan ini meliputi akses untuk kegiatan pembelajaran serta pelaksanaan acara hari besar keagamaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala SMKN 1 Ponorogo, Bapak Suryanto, yang menjelaskan bahwa komite sekolah terdiri dari dua unsur utama: masyarakat dan orang tua/wali siswa. Masyarakat yang terlibat, seperti warga dari Jalan Abi Manyu, memberikan perhatian khusus karena mayoritas siswa berasal dari daerah tersebut. Selain itu, komite juga terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti Idul Adha, yang memperlihatkan pendekatan emosional dan keterlibatan komunitas.

2) Kolaborasi dengan Lingkungan

Dalam pelaksanaannya, dukungan komite melibatkan tiga unsur: orang tua, masyarakat, dan lingkungan. Komite sekolah menyadari pentingnya kolaborasi dengan lingkungan sekitar dalam berbagai kegiatan, seperti acara malam hari dan program-program lain. Ini menunjukkan usaha untuk menjalin hubungan

baik dan kerjasama yang berkelanjutan dengan lingkungan sekitar.

b. Dukungan dalam Pengalokasian dan Penyepakatan Anggaran

1) Penyepakatan Anggaran

Komite sekolah memberikan dukungan penting dalam hal penyepakatan rincian anggaran untuk program-program pendidikan akhlak. Hal ini mencakup pembiayaan untuk kegiatan seperti bimbingan baca tulis Al-Qur'an dan lomba-lomba yang diadakan di sekolah. Kepala SMKN 1 Ponorogo, Bapak Suryanto, menegaskan bahwa dukungan komite dalam penyediaan anggaran sangat vital bagi keberhasilan program-program tersebut. Komite turut berperan dalam penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas, seperti lantai parkir, yang menunjukkan dukungan mereka dalam aspek fisik dan keuangan.

2) Pengimplementasian dan Kehadiran dalam Kegiatan

Dukungan komite juga tercermin dalam kehadiran mereka pada setiap pembahasan dan pelaksanaan kegiatan. Ini meliputi partisipasi dalam acara perpisahan dan purnawiyata siswa, serta rapat-rapat yang melibatkan orang tua dan anggota komite untuk merumuskan program-program pendidikan akhlak.

c. Pengimplementasian Program Pendidikan Akhlak

1) Pembiasaan dan Pembudayaan Karakter

Program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo dilakukan melalui pembiasaan dan pembudayaan karakter positif. Ini

termasuk kegiatan seperti shalat berjamaah dan pelaksanaan pembinaan keimanan dan ketaqwaan yang diadakan secara berkala. Guru PAI dan pembina Rohis mengungkapkan bahwa program-program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik kepada siswa melalui berbagai kegiatan, baik formal maupun non-formal.

2) Peringatan Hari Besar Keagamaan

Aspek kedua dari program pendidikan akhlak adalah peringatan hari-hari besar Islam, seperti Idul Adha dan Maulid Nabi. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak, termasuk siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Kegiatan seperti takbir bersama dan lomba-lomba keagamaan turut memeriahkan perayaan hari besar tersebut. Keterlibatan Rohis dan siswa dalam kegiatan ini menunjukkan integrasi antara pendidikan akhlak dengan aktivitas keagamaan.

d. Bukti dan Implementasi Program

1) Wujud Nyata dari Kegiatan

Bukti dari pelaksanaan program pendidikan akhlak dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pembiasaan karakter positif dan peringatan hari besar keagamaan. Ketua Rohis, Adik Alfinia, menegaskan bahwa orang tua siswa umumnya mengetahui dan mendukung kegiatan-kegiatan ini. Misalnya, mereka menerima pemberitahuan mengenai iuran

untuk kurban dan donasi, serta terlibat dalam kegiatan shalat berjamaah di sekolah.

2) Evaluasi dan Feedback

Secara keseluruhan, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan akhlak berjalan sesuai harapan. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap perkembangan sikap siswa dan pelaksanaan program pendidikan akhlak, baik dari sisi manajemen sekolah maupun dari perspektif siswa.

Dengan dukungan aktif dari komite sekolah, SMKN 1 Ponorogo berhasil melaksanakan program-program pendidikan akhlak yang berdampak positif bagi siswa dan lingkungan sekolah. Dukungan tersebut mencakup keterlibatan dalam kegiatan, penyepakatan anggaran, serta pengimplementasian program yang bermanfaat bagi pembentukan karakter siswa.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Membangun Pendidikan Akhlak di SMKN 1 Ponorogo

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMKN 1 Ponorogo berfokus pada dukungan dalam bentuk usulan kegiatan, masukan, serta kritik dan saran terhadap program pendidikan akhlak. Tugas ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, terutama rapat dengar pendapat antara komite sekolah dan pihak sekolah. Berikut adalah uraian deskriptif mengenai peran tersebut:

a. Peran Pemberi Pertimbangan

Sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah di SMKN 1 Ponorogo memainkan beberapa fungsi penting. Pertama, mereka memberikan usulan mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan pendidikan akhlak di sekolah. Misalnya, mereka mengusulkan kegiatan latihan kurban saat Idul Adha, yang meliputi shalat Ied bersama dan pembagian daging kurban. Usulan ini merupakan bentuk kontribusi konkret mereka dalam pengembangan program pendidikan akhlak di sekolah.

b. Kesepakatan dan Pengawasan

Setelah menerima usulan kegiatan, komite sekolah tidak hanya memberikan masukan tetapi juga terlibat dalam proses kesepakatan. Mereka menyetujui rencana kegiatan dan memastikan bahwa besaran dana yang diperlukan tidak memberatkan siswa. Proses ini melibatkan perhitungan dan penetapan iuran agar sesuai dengan kemampuan siswa dan orang tua.

Selain itu, komite sekolah berperan dalam pengawasan penggunaan dana. Mereka memastikan bahwa dana yang telah disepakati digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan dan tidak ada penyimpangan. Jika ditemukan penyimpangan, mereka segera menindaklanjutinya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

3) Rapat Dengar Pendapat

Proses pelaksanaan peran sebagai pemberi pertimbangan dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan setiap

awal semester atau awal tahun ajaran baru. Dalam rapat ini, seluruh anggota komite diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, kritik, dan saran terkait program pendidikan akhlak. Rapat ini juga merupakan forum untuk membahas dan menyepakati rincian kegiatan serta anggaran yang diperlukan.

4) Kritik dan Saran

Komite sekolah juga berfungsi memberikan kritik dan saran yang membangun. Ini termasuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan memberikan alternatif solusi jika ada masalah. Misalnya, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan program, komite memberikan saran perbaikan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.

5) Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan bagian penting dari peran komite sebagai pemberi pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program pendidikan akhlak yang dilaksanakan. Proses evaluasi dilakukan di akhir tahun ajaran atau bahkan secara berkala, seperti bulanan, untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang diharapkan.

6) Keterlibatan Wali Murid

Peran wali murid dalam komite sekolah sangat penting dalam memberikan pertimbangan. Mereka menyampaikan pendapat dan aspirasi dari sudut pandang orang tua, termasuk mengenai anggaran

dan kegiatan yang direncanakan. Usulan mereka sering kali mencakup penekanan pada program pendidikan akhlak seperti shalat berjamaah dan pembiasaan karakter positif, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan moral siswa.

7) Implementasi dan Sinergitas

Seluruh usulan, kritik, dan saran yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang terencana. Sinergi antara komite dan pihak sekolah memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan harapan bersama. Keterlibatan aktif komite sekolah dalam proses ini membantu menciptakan program pendidikan akhlak yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dengan demikian, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMKN 1 Ponorogo mencakup berbagai aspek penting dari usulan kegiatan hingga evaluasi program, semuanya bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan akhlak di sekolah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Sekolah dalam Membangun Pendidikan Akhlak Di SMKN 1 Ponorogo

Dalam konteks pelaksanaan program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran program tersebut. Berikut adalah uraian deskriptif mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah aspek-aspek yang memberikan dorongan dan kemudahan bagi pelaksanaan program, sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks peran komite sekolah di SMKN 1 Ponorogo, faktor pendukung utama terletak pada keterbukaan dan dukungan dari pihak sekolah.

1) Keterbukaan Pihak Sekolah

SMKN 1 Ponorogo secara rutin memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui rapat dengar pendapat yang diadakan di awal semester atau tahun ajaran baru. Keterbukaan ini memungkinkan komite untuk berkontribusi aktif dalam merancang dan menilai program pendidikan akhlak.

2) Dukungan dari Sekolah

Pihak sekolah mendukung kegiatan pendidikan akhlak dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti peringatan hari besar keagamaan dan pembiasaan karakter positif. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan program pendidikan akhlak.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah aspek-aspek yang menjadi kendala dan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program. Beberapa faktor penghambat dalam konteks ini meliputi:

1) Keterbatasan Kemampuan Pengawasan

Komite sekolah mengalami kendala dalam melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan program pendidikan akhlak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu para anggota komite yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan pekerjaan, sehingga tidak dapat memantau secara berkala pelaksanaan program di sekolah.

2) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat utama. Para anggota komite sering kali menghadapi kesulitan dalam menyepakati iuran dana untuk kegiatan pendidikan akhlak karena variabilitas kondisi ekonomi para wali murid. Hal ini membuat proses penyusunan anggaran menjadi tantangan tersendiri.

3) Respon Pribadi Siswa

Meskipun dukungan sekolah kuat, faktor penghambat juga terletak pada respon individu siswa. Beberapa siswa belum terbiasa dengan pembiasaan karakter positif dan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, yang mempengaruhi efektivitas program pendidikan akhlak.

Dengan demikian, baik faktor pendukung maupun penghambat mempengaruhi efektivitas program pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo. Keterbukaan sekolah, dukungan komite, dan partisipasi siswa adalah elemen penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian tentang peran komite sekolah dalam membangun pendidikan akhlak di SMKN 1 Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Membangun Pendidikan Akhlak. Komite sekolah SMKN 1 Ponorogo berperan penting sebagai pendukung dalam membangun pendidikan akhlak. Dukungan ini terlihat melalui keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan lingkungan, serta pengalokasian anggaran untuk program-program pendidikan akhlak. Partisipasi komite dalam kegiatan keagamaan, penyepakatan anggaran, dan kehadiran dalam kegiatan menunjukkan kontribusi mereka dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan akhlak siswa.
2. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Membangun Pendidikan Akhlak. Sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah turut berperan aktif dalam memberikan usulan, kritik, dan saran untuk program pendidikan akhlak. Mereka berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat, memberikan masukan terkait rencana kegiatan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan komitmen komite dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program pendidikan akhlak di sekolah.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Akhlak. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program

pendidikan akhlak mencakup keterbukaan pihak sekolah dan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter. Namun, terdapat juga faktor penghambat, seperti keterbatasan kemampuan komite dalam pengawasan dan keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program. Selain itu, respon pribadi siswa terhadap pembiasaan karakter positif dan kegiatan keagamaan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. Kepada Guru

Dengan adanya hasil penelitian ini, komite sekolah disarankan untuk terus melakukan pendekatan yang lebih kepada siswa sehingga dapat mengetahui karakter siswa dan terus berperan aktif guna membangun pendidikan akhlak khususnya di SMKN 1 Ponorogo.

b. Bagi Orang Tua

Dengan adanya hasil penelitian ini, orang tua disarankan juga untuk dapat juga ikut serta dalam membangun pendidikan akhlak pada anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Aziz (2017) “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sman 28 Kabupaten Tangerang,” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, Saiful (2023), *Membumikan Pendidikan Akhlak: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Solok: Mitra Cendekia Media.
- Bisri, Abdul Mukti. “Studi Analisis Komite Sekolah/Sekolah Dalam Mengawal Kualitas Pendidikan.” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 1 (March 25, 2020): 51–64. <https://doi.org/10.31538/Munaddhomah.V1i1.31>.
- Budiman, Haris. “Dampak Penayangan Film Remaja Di Televisi Terhadap Akhlak Remaja Di Kelurahan Way Dadi Baru Sukarame Kota Bandar Lampung.” *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, No. 1 (October 16, 2018): 81. <https://doi.org/10.24042/Alidarah.V8i1.3082>.
- Bukhori, Imam (2021), *Proses Pendidikan Akhlak Mulia Melalui Pembiasaan di Sekolah*, Jakarta: Madrasah Tsanawiyah Negeri 12.
- Djuju, (2006) *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Fauziah Herisfina, (2018) “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 3 Cisauk,” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Febriana, Lilys, (2019). “Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 1 Palembang,” *Jurnal Pai Raden Fatah*, Vol. 1, No .2.
- Hadi, Abdul, Asrori, And Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: Penerbit Cv. Pena Persada, 2021.

- Hawasyi, Ahmad (2020), *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja*, Jakarta: PT. Naraya Elaborium Optima.
- Ibrahim, Kelvin Adha Bilqis dan Dian Gustina, “Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Android untuk Brand Clothing Sand Beach dengan Skema Diskon Menggunakan Hungarian Algorithm,” *Universitas Persada Indonesia Y.A.I*, Volume 5, Nomor 1 (2021), 54.
- Iskarim, Mochamad. “Dekadensi Moral Di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi Pai Dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa),”
- Kasman, Suraya, (2022): “Analisi Peranan Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 2 Kabupaten Bima,” *Journal Of Management*, Vol. 5, No. 3, 335-342
- Khaeruddin dan Mahfud Junaedi, (2007), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Sekolah*, Jogjakarta: Nuansa Aksara
- Kuntoro, Alfian Tri. “Manajemen Mutu Pendidikan Islam.” *Jurnal Kependidikan* 7, No. 1 (May 31, 2019): 84–97. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>.
- Kusumastuti, Adhi et al. (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Misbah, M. “Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 14, no. 1 (2009): 4.
- Moleong, Lexy. J. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Malli, Rusli. “Peran Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pai Terhadap Pembinaan Ahlak Anak Binaan Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,”
- Muhaimin (2019), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Nur, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, “Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4, no. 1 (2016): 95.

- Mulyasa, (2013), *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawwir, A.W. dan Muhammad Fairuz (2007), *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur Arifah (2018), *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, Yogyakarta: Araska Publisher.
- Nurdyansyah dan Andiek Widodo (2017), *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*, Sidoarjo: Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Prabowo, Indra Jaya Krisna Gede et al, “Pengembangan Sistem Mobile Application Berbasis Android untuk Referensi Belajar PAI Santri Sekolah Tsanawiyah,” *Jurnal Teknologi Pendidikan UNY 2*, no. 1 (2021): 10.
- Purnomo, Singgih Aji. “Orientasi Baru Lingkungan Pendidikan,”
- Qiptiyah, Titin Mariatul. “Pendidikan Akhlak Pada Anak ‘Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.’” *Childhood Education : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1*, No. 2 (May 9, 2020): 108–20. <https://doi.org/10.53515/Cji.2020.1.2.108-120>.
- Raberi, Ariyadi, Happy Fitria, And Yessi Fitriani. “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru.” *Jurnal Al-Qiyam 1*, No. 1 (June 29, 2020): 11–20. <https://doi.org/10.33648/Alqiyam.V1i1.123>.
- Rabiah, Sitti. “Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” 6, No. 1.
- Sagala, Syaiful (2009), *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Ananda dan Slamet Priyanto (2010), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV Cahaya Agency.
- Sholihin, M. dan M. Rosyid Anwar (2007), *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.

Syah, Muhibbin (2019), *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ulfiatunnisa, Nila, “Manfaat Pendidikan untuk Masa Depan Perspektif Assatidz Pondok Pesantren Darunnajah Cipinang Bogor,” *Darunnajah: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 73-75.

Zaril Gapari Muhammad, (2019). “Implementasi Manajemen Pendidikan Akhlak di Man 1 Lombok Timur,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1.

Zakaria, Muakhor. “Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Melalui Program Smart Parenting Dengan Pendekatan Hypnoparenting Tentang Kemandirian Belajar, Gaya Belajar Dan Resiliensi Matematis Siswa Di Era Digital” 2 (2021)

